

KOMPENSASI WARTAWAN DAN INDEPENDENSI

**(Studi deskriptif tentang peranan kompensasi wartawan terhadap independensi
anggota Aliansi Jurnalis Independen cabang Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Oleh:

KHAIRIL HANAN LUBIS

070904033



DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2011

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul Kompensasi Wartawan dan Independensi (Peranan Kompensasi Wartawan Terhadap Independensi Anggota Aliansi Jurnalis Independen Cabang Medan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompensasi yang diterima wartawan dan sejauh mana tingkat independensi wartawan yang terdaftar sebagai anggota Aliansi Jurnalis Independen cabang Medan tersebut dalam mengonstruksi suatu berita.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Penelitian deskriptif mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang merupakan pengukuran dengan menggunakan data nominal yang menyangkut klasifikasi atau kategorisasi sejumlah variabel ke dalam beberapa sub kelas nominal. Melalui pendekatan kualitatif, data yang diperoleh dari lapangan dapat diambil kesimpulan yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum.

Penelitian ini menggunakan teori atribusi, yaitu proses menyimpulkan motif, maksud, dan karakteristik orang lain dengan melihat pada perilakunya yang tampak. Jadi, melihat motif yang mendasari perilaku seseorang. Subjek dalam penelitian ini adalah wartawan anggota Aliansi Jurnalis Independen cabang Medan yang seluruhnya berjumlah 45 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kompensasi yang diterima wartawan dari perusahaan media tempatnya bekerja ternyata memiliki peranan penting terhadap independensi wartawan dalam membuat berita. Pendapatan yang mereka terima hasil bekerja menjadi wartawan ternyata jauh dari kata cukup. Kebutuhan hidup mereka terutama yang sudah berkeluarga, berkali-kali lipat lebih besar dari kompensasi yang mereka dapatkan. Hal ini menyebabkan para wartawan tersebut melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari mencari pekerjaan sampingan hingga menerima pemberian dari narasumber. Dua hal tersebut ternyata dapat mengganggu independensi seorang wartawan. Teori atribusi kemudian berlaku. Ada hubungan sebab-akibat dari situasi itu. Kompensasi seorang wartawan yang tidak mencukupi, menyebabkan mereka menerima pemberian narasumber demi menambah penghasilan, meskipun ada juga dengan alasan yang lain. Pemberian yang diterima tersebut kemudian berdampak pada independensi mereka, meskipun mereka berusaha mencari celah agar tak terlihat secara langsung. Perusahaan media tempat mereka bekerja juga seolah tutup mata dengan perilaku itu, karena sadar belum memberikan kompensasi yang layak pada wartawannya. Itulah sebabnya Kode Etik Wartawan Indonesia maupun AJI melarang seorang wartawan menerima pemberian apapun dari narasumber termasuk uang, hadiah, maupun pemberian fasilitas. Para responden yang notabene anggota AJI, tetap mengambil resiko melanggar aturan ketat organisasinya karena kompensasi yang diterima sangat minim. Menjalankan pekerjaan sampingan atau berprofesi ganda, terkadang juga rentan memengaruhi kinerja profesional wartawan. Dari yang bersinggungan dengan politik hingga instansi pemerintahan. Beberapa responden melakukan itu demi mencukupi kebutuhan keluarga mereka.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas anugerah pikiran dan berkah ilmu yang telah Ia berikan.

Penulisan skripsi yang berjudul **“Peranan Kompensasi Wartawan Terhadap Independensi Anggota Aliansi Jurnalis Independen Cabang Medan”** ini berawal dari keprihatinan penulis terhadap perkembangan dunia jurnalistik, khususnya di Kota Medan. Ilmu yang didapat dan dipelajari dalam kampus ternyata amat berat diterapkan ketika berhadapan dengan kondisi di lapangan seperti sekarang ini. Penulis berharap skripsi ini tak hanya bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam memperoleh gelar Sarjana Sosial di Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, tapi juga sebagai sumbangsih langsung pada studi ilmu komunikasi.

Pengerjaan skripsi ini berbekal dari berbagai proses pendidikan baik formal maupun informal yang didapat, serta pengalaman langsung yang penulis rasakan. Proses perkuliahan di Departemen Ilmu Komunikasi, bergiat di Pers Mahasiswa SUARA USU dan berbagai pengalaman lain. Berbagai referensi juga didapat dari buku-buku dan hasil pencarian secara daring. Termasuk beberapa buku yang diberikan Dewan Pers dan AJI Indonesia saat penulis berkunjung ke dua lembaga itu. Terima kasih atas kontribusinya.

Secara khusus terima kasih tak terhingga kepada ayahanda H. Taufik Lubis, SE dan ibunda Dr. Hj. Mahriyuni, M.Hum atas kesabaran, kasih sayang dan dukungan yang selalu diberikan pada jalan yang penulis tempuh. Dua orang yang selalu menginspirasi.

Banyak pihak terlibat dalam pengerjaan skripsi ini. Bantuan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak kerap penulis dapatkan. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.
2. Ketua Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Sumatera Utara.
3. Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan, arahan dan bimbingan dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Seluruh dosen, staf, dan rekan-rekan di Departemen Ilmu Komunikasi, tempat penulis menimba ilmu selama empat tahun ini. Banyak pelajaran yang penulis petik dari orang-orang hebat di sana.
5. Pers Mahasiswa SUARA USU. Tiga tahun yang begitu bernilai, kampus yang sebenarnya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk organisasi itu.
6. Teman-teman jurnalis se-kota Medan, AJI cabang Medan, rekan-rekan aktivis pers mahasiswa. Terus berjuang kawan, kalian ada sebagai pengungkap kebenaran bukan sekedar buruh media.

Penulis menyadari, penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran tentu sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga bermanfaat.

Medan, September 2011

Penulis

KHAIRIL HANAN LUBIS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAKSI **i**

KATA PENGANTAR..... **ii**

DAFTAR ISI **iv**

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah.....	1
I.2. Perumusan Masalah	7
I.3. Pembatasan Masalah	7
I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
I.4.1. Tujuan Penelitian	8
I.4.2. Manfaat Penelitian	8
I.5. Kerangka Teori.....	9
I.5.1. Atribusi.....	9
I.6. Kerangka Konsep	10
I.6.1. Komunikasi.....	11
I.6.2. Kompensasi.....	12
I.6.3. Wartawan.....	12
I.6.4. Independensi.....	15
I.7. Alur Teoritis	16
I.8. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II URAIAN TEORITIS

II.1. Komunikasi	19
II.1.1. Jurnalistik.....	20
II.2. Teori Atribusi.....	21
II.2.1. Atribusi Kausalitas.....	23
II.3. Kompensasi.....	25
II.3.1. Kompensasi Langsung.....	27
II.3.2. Kompensasi Tidak Langsung.....	27
II.3.3. Insentif	28
II.4. Wartawan	28
II.5. Independensi	32
II.5.1. Independensi dan Amplop.....	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

III.1. Metode Penelitian yang Digunakan	36
III.2. Lokasi Penelitian.....	36
III.3. Subjek dan Informan Penelitian.....	37

III.3.1. Sejarah Aliansi Jurnalis Independen.....	38
III.3.2. Sejarah Aliansi Jurnalis Independen Cabang Medan.....	40
III.3.3. Visi dan Misi Aliansi Jurnalis Independen.....	41
III.3.4. Aliansi Jurnalis Independen dan Upah Layak.....	43
III.4. Teknik Pengumpulan Data.....	47
III.5. Teknik Analisis Data.....	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1. Hasil Pengamatan dan Wawancara.....	49
IV.1.1. Hasil Wawancara.....	52
IV.1.2. Hasil Pengamatan.....	88
IV.2. Pembahasan.....	89
IV.2.1. Proses Atribusi.....	90
IV.3. Penelitian Sejenis.....	94
IV.3.1. Kekerasan Terhadap Wartawan.....	94
IV.3.2. Profesionalisme Jurnalis Televisi Lokal.....	95

BAB V PENUTUP

V.1. Kesimpulan.....	96
V.2. Saran.....	98

Daftar Pustaka.....	99
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Jurnalisme berarti pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit dan menerbitkan berita. Tujuan utama jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup bebas dan mengatur diri sendiri. Media membantu kita mendefinisikan komunitas kita, menciptakan bahasa yang dipakai bersama dan pengetahuan yang dipakai bersama. Pengetahuan yang berakar pada realitas. Jurnalisme juga membantu mengenali tujuan komunitas, para pahlawan dan para penjahat.

Paul Johannes Paulus II dalam Kovach (2006: 16) mengatakan: “Dengan pengaruhnya yang besar dan langsung terhadap opini publik, jurnalisme tidak bisa dipandu hanya oleh kekuatan ekonomi, keuntungan dan kepentingan khusus. Sebaliknya jurnalisme harus dihayati sebagai misi yang dalam batas tertentu dianggap suci, bertindak-tanduk dengan pemahaman bahwa cara berkomunikasi yang kuat telah dipercayakan kepada Anda demi kebaikan semua.”

Media massa adalah alat dari jurnalisme yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV (Cangara, 1998: 134). Media massa adalah faktor lingkungan yang mengubah perilaku khalayak melalui proses pelaziman klasik, pelaziman operan atau proses imitasi (belajar sosial). Dua fungsi dari media massa adalah media massa memenuhi kebutuhan akan fantasi dan informasi (Rakhmat, 2001: 207).

Orang yang bekerja untuk media massa disebut wartawan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi IV tahun 2008 mendefinisikan wartawan atau jurnalis sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi; juru warta; jurnalis. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik (Pasal 1 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers).

Berita-berita yang dicari dan ditulis oleh wartawan selanjutnya dikirim ke meja redaksi media dan selanjutnya dipublikasikan. Kegiatan mencari berita, mengolah berita, menulis berita dan menyusun berita tersebut akhirnya menjadi sebuah profesi. Kebebasan pers menjadikan perusahaan media tersebar di mana-mana.

Wartawan sebagai pekerja pers juga membutuhkan pendapatan untuk menopang hidupnya. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan (Hasibuan, 2000: 117).

Kompensasi dapat berupa gaji, bonus, tunjangan atau tambahan penghasilan. Gaji adalah suatu pembayaran tetap, sementara bonus didasarkan pada pencapaian tujuan-tujuan kinerja untuk suatu periode. Gaji, bonus, tunjangan atau tambahan penghasilan mencakup tunjangan-tunjangan khusus bagi karyawan, seperti bepergian, keanggotaan dalam suatu klub kebugaran, asuransi jiwa, tunjangan kesehatan, tiket untuk hiburan dan bayaran-bayaran tambahan lainnya oleh perusahaan.

Terjaminnya independensi wartawan, secara tidak langsung berdampak pada independensinya dalam membuat sebuah pemberitaan. Independensi menurut KBBI edisi 2008 adalah keadaan yang tidak bergantung kepada orang lain, keadaan tidak merdeka, tidak di bawah kekuasaan atau pengaruh negara lain. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel

menyebutkan ada sembilan elemen jurnalisme. Pada elemen keempat disebutkan, jurnalis harus tetap independen dari pihak yang mereka liput (Kovach, 2006: 119).

Independensi merupakan hal tersulit untuk dipertahankan manakala seseorang berhadapan dengan pihak di mana kita memiliki kepentingan dan secara emosi menjadi bagian darinya. Masihkah independensi terjaga ketika harus berhadapan dengan keluarga, rekan, majikan atau lawan-lawan kita? Dengan orang yang sudah memberi uang dan kita anggap baik? Pandangan bisa menjadi bias kemudian tidak objektif lagi. Memberi simpati berlebih. Terhadap lawan-lawan kita juga tidak objektif, namun menilainya dengan nada antipati. Menjadi netral bukanlah prinsip dasar jurnalisme. Imparsialitas juga bukan yang dimaksud dengan objektivitas. Prinsipnya, wartawan harus bersikap independen terhadap orang-orang yang mereka liput (Harsono, 2010: 25).

Kebebasan pers yang saat ini kita rasakan sayangnya tidak diiringi dengan profesionalisme perusahaan media terhadap para pekerjanya. Masih banyak wartawan yang diupah rendah, bahkan di antaranya dibayar di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR). Tak heran, kondisi wartawan yang memprihatinkan ini pada akhirnya bekerja tidak profesional dan melanggar kode etik wartawan.

Standar penghasilan atau kompensasi yang relatif rendah tentu saja membuat wartawan Indonesia mengalami kesulitan menjalani kehidupan dan penghidupan mereka, termasuk dalam melaksanakan profesinya. Sebagai wartawan, mereka pastilah terbiasa bersinggungan dengan banyak pihak dan banyak suasana. Penghasilan yang rendah sering kali membuat wartawan dalam posisi yang sulit untuk mampu mempertahankan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik dan mempertahankan idealisme yang menggebu di dalam dada ketika mulai menjadi wartawan.

Pada titik inilah kompensasi dan pendapatan memberikan dampak sikap yang bervariasi pada diri wartawan. Misalnya saja dalam soal penerimaan suap, amplop atau apa pun namanya, yang dilarang oleh Kode Etik Jurnalistik ditanggapi dengan sikap sehari-hari wartawan yang sangat berlainan.

Hasil penelitian Wina Armada Sukardi, anggota dewan pers, pada tahun 2008 menunjukkan 55,13% gaji wartawan di Indonesia berada di bawah Rp 1,5 juta (Sukardi, 2009: 57). Sebelumnya pada tahun 2005 hasil survei Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menghasilkan, mayoritas wartawan di Indonesia yaitu 57,8% bergaji di bawah Rp 1,5 juta (Eriyanto, 2006: 13). Dengan demikian dari kedua hasil survei tersebut menunjukkan rata-rata gaji wartawan berada pada seputaran Upah Minimum Regional (UMR), upah buruh tersebut adalah gaji yang diberikan untuk level paling rendah.

Kesenjangan antara kemerdekaan pers dan kesejahteraan wartawan tentu berdampak pada profesionalitas dan independensi wartawan. Di sinilah bahaya mulai mengintip. Wartawan yang seharusnya menjalankan dan menjaga kemerdekaan pers, dalam skala yang tinggi, justru dapat merongrong pelaksanaan kemerdekaan pers itu sendiri (Sukardi, 2009: 12).

Sistem pengupahan yang rendah dalam perusahaan pers tanpa disadari menjadikan budaya amplop menjadi sebuah pembenaran. Banyak perusahaan pers sengaja memberikan gaji pas-pasan bahkan kurang, karena mengetahui wartawannya pasti bakal dapat tambahan penghasilan atau amplop. Si wartawan pun tidak perlu repot-repot memperjuangkan perbaikan gaji karena dia bisa mendapat tambahan dari amplop.

Salah satu prinsip utama kerja wartawan adalah independen dan tidak terikat sumber berita. Dengan menerima amplop dari sumber berita, wartawan tidak lagi bisa

menjaga sikap independensinya. Hasil survei AJI pada tahun 2005 di 17 kota di Indonesia termasuk Medan, menunjukkan 67,8% wartawan menilai pemberian narasumber berupa uang akan memengaruhi terhadap liputan mereka.

Tidak ada amplop tanpa pamrih. Implikasi kerja wartawan adalah kepercayaan konsumennya. Maka kepatuhan pada etika adalah prinsip yang tidak bisa ditawar, dengan alasan apa pun (Atmakusumah, 2003: 15).

Ketatnya persaingan bisnis media, menuntut wartawan harus bekerja lebih profesional, meski dengan kondisi kesejahteraan yang memprihatinkan. Tentu saja tuntutan itu muncul demi mendapatkan berita eksklusif yang berdaya jual tinggi. Tidak jarang seorang jurnalis harus menunggu berjam-jam untuk meminta konfirmasi narasumber. Mereka pun harus siap keluar tengah malam untuk meliput kejadian seperti pembunuhan, kebakaran dan aksi terorisme.

Wartawan tak akan pernah menjadi wartawan profesional jika tidak memiliki semangat untuk menjadi (seorang) profesional. Semangat profesional akan melahirkan kecintaan, militansi dan solidaritas terhadap profesi. Tanpa hal-hal ini, wartawan akan terjebak untuk melakukan pekerjaan wartawan sebagai sebuah rutinitas yang menjenuhkan, melelahkan dan kering kerontang. Wartawan akan memperlakukan pekerjaan wartawan teknis semata, yang penting ada berita, yang penting penugasan sudah dilakukan, yang penting *deadline* terpenuhi. Wartawan model begini sebenarnya adalah robot, menjadikan karya-karya jurnalistiknya tanpa roh, tak punya kepribadian dan gampang menjadi alat kekuasaan dan uang (Oetama, 2001: 51).

Kesenjangan antara kemerdekaan pers dan kesejahteraan wartawan tentu berdampak pada profesionalitas dan independensi wartawan. Di sinilah bahaya mulai

mengintip. Wartawan yang seharusnya menjalankan dan menjaga kemerdekaan pers, dalam skala yang tinggi, justru dapat merongrong pelaksanaan kemerdekaan pers itu sendiri (Sukardi, 2009: 12).

AJI adalah salah satu organisasi profesi wartawan. AJI lahir sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rezim Orde Baru. Mulanya adalah pemberedelan Detik, Editor dan Tempo, 21 Juni 1994. Ketiganya diberedel karena pemberitaannya yang tergolong kritis kepada penguasa. Tindakan represif inilah yang memicu aksi solidaritas sekaligus perlawanan dari banyak kalangan secara merata di sejumlah kota.

Gerakan perlawanan terus mengkristal. Akhirnya, sekitar 100 orang yang terdiri dari jurnalis dan kolumnis berkumpul di Sirnagalih, Bogor, 7 Agustus 1994. Pada hari itulah mereka menandatangani Deklarasi Sirnagalih. Inti deklarasi ini adalah menuntut dipenuhinya hak publik atas informasi, menentang pengekangan pers, menolak wadah tunggal untuk jurnalis, serta mengumumkan berdirinya AJI.

Januari 2011 lalu, AJI meluncurkan upah layak jurnalis 2011 secara serentak di 16 kota cabang AJI: Jakarta, Surabaya, Kediri, Semarang, Yogyakarta, Medan, Bandar Lampung, Pontianak, Batam, Pekanbaru, Makassar, Kendari, Palu, Denpasar, Kupang dan Jayapura. AJI mengampanyekan “Bebas Amplop”.

Peluncuran upah layak jurnalis secara serentak ini menjadi bagian dari kampanye perjuangan AJI dalam meningkatkan profesionalitas jurnalis yang kerap terbentur dengan kesejahteraan yang tidak layak. Di kota-kota tersebut, mulai Desember 2010 hingga pertengahan Januari 2011, AJI menyurvei standar upah layak jurnalis berdasarkan komponen dan harga kebutuhan hidup layak, dengan mengukur perubahan biaya hidup

(*living cost*) seiring kenaikan harga barang di pasaran yang sesuai dengan kebutuhan seorang jurnalis. AJI menolak menggunakan standar Upah Minimum Kota (UMK) yang masih kerap digunakan perusahaan media sebagai patokan untuk menggaji jurnalisnya.

”Upah yang rendah bisa membuat jurnalis terjebak menjadi pragmatis, tidak independen dan rentan terhadap suap,” kata Nezar Patria, Ketua Umum AJI Indonesia (www.ajiindonesia.org). Salah satu visi misi AJI adalah memperjuangkan kesejahteraan jurnalis.

Hasil survei di Kota Medan pada tahun 2010 menunjukkan upah layak yang mestinya diberikan kepada jurnalis muda yang baru diangkat menjadi karyawan tetap adalah Rp 3.816.120. Berbanding terbalik dengan tuntutan upah layak, survei AJI di berbagai kota tersebut masih menemukan fakta yang sangat memprihatinkan. Ditemukan, masih ada media yang menggaji jurnalisnya di bawah angka UMK. Di Medan, Sumatera Utara, jurnalis radio City FM dan Star News, juga hanya memperoleh upah Rp 500 ribu-Rp 700 ribu, bahkan ada yang diupah berdasarkan hitungan berita.

Berdasarkan pengamatan peneliti, wartawan yang termasuk anggota AJI cabang Medan juga masih ada yang menerima ‘amplop’. Hal ini dimungkinkan karena gaji rata-rata wartawan di Kota Medan sangat rendah. Apalagi berdasarkan pengalaman peneliti, sebagian besar narasumber—khususnya yang berkantong tebal—maupun institusi pada acara-acara seremonial, kerap memberikan ‘amplop’ kepada wartawan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk menggambarkan kompensasi wartawan dan independensi dalam membuat pemberitaan terhadap wartawan anggota Aliansi Jurnalis Independen cabang Medan.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana gambaran kondisi kompensasi dan independensi wartawan anggota AJI cabang Medan?”

I.3 Pembatasan Masalah

Agar tidak terjadi ruang lingkup penelitian yang terlalu luas dan akan mengaburkan penelitian, maka peneliti merasa perlu membuat pembatasan masalah agar menjadi lebih jelas. Pembatasan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Penelitian hanya menggambarkan kondisi kompensasi wartawan dan independensi dalam mengkonstruksi berita.
2. Wartawan yang dijadikan responden dikhususkan pada anggota AJI cabang Kota Medan yang masih aktif.
3. Penelitian dilakukan sejak bulan Maret 2011 dengan lama penelitian disesuaikan dengan tingkat kebutuhan.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompensasi yang diterima wartawan anggota AJI cabang Kota Medan.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat independensi wartawan AJI cabang Kota Medan dalam mengkonstruksi suatu pemberitaan.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana AJI mampu menjamin anggotanya bebas 'amplop'.

I.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna dalam memperluas pengetahuan peneliti dalam bidang jurnalistik, khususnya kompensasi wartawan dan independensi.
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah penelitian tentang wartawan di Departemen Ilmu Komunikasi FISIP USU.
3. Sebagai bahan masukan bagi rekan-rekan mahasiswa komunikasi lainnya, terutama yang tertarik di bidang jurnalistik.
4. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pihak terkait seperti pemerintah, AJI, maupun pemilik media dalam mengambil kebijakan terhadap wartawan.

I.5 Kerangka Teori

Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan masalah atau menyoroti masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori

yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana penelitian tersebut disoroti (Nawawi, 1995: 40).

Menurut Kerlinger, teori merupakan suatu himpunan konstruk (konsep) yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut (Rakhmat, 2004: 6). Dalam hal ini, teori juga berfungsi untuk memberi bantuan dalam mempertajam analisis peneliti dalam meneliti pokok permasalahan. Dalam penelitian ini, teori yang dianggap relevan adalah sebagai berikut:

I.5.1 Atribusi

Atribusi adalah proses menyimpulkan motif, maksud dan karakteristik orang lain dengan melihat pada perilakunya yang tampak (Baron dan Byrne, 1979: 56 dalam Rakhmat, 2005: 93). Jika kita melihat perilaku orang lain, maka kita juga harus melihat apa sebenarnya yang menyebabkan seorang berperilaku seperti itu. Dengan demikian kita harus mempunyai daya prediksi terhadap perilaku orang lain mengapa seseorang bertindak, berperilaku seperti tampak dari perhatian kita, bagaimana mungkin sikapnya selanjutnya.

Secara garis besar ada dua macam atribusi; atribusi kausalitas dan atribusi kejujuran. Sebagai contoh jika kita mengamati perilaku sosial, pertama-tama kita menentukan dahulu apa yang menyebabkannya, faktor situasional atau personal; dalam teori atribusi lazim disebut kausalitas internal. Intinya hanya mempertanyakan perilaku orang lain seperti yang terlihat itu apakah karena faktor situasional ataukah faktor-faktor personal. Sedangkan pada atribusi kejujuran, kita akan memperhatikan dua hal; (1) sejauh

mana pernyataan orang itu menyimpang dari pendapat yang populer dan diterima orang, (2) sejauh mana orang itu memperoleh keuntungan dari kita dengan pernyataannya itu (Liliweri, 1991: 55).

Berdasarkan teori atribusi, penyebab yang dipersepsikan dari suatu yang mempengaruhi perilaku orang. Secara lebih spesifik, individu akan berusaha menganalisis mengapa peristiwa tertentu muncul dan hasil dari analisis tersebut akan mempengaruhi perilaku mereka di masa mendatang.

Seorang karyawan yang menerima kenaikan gaji akan berusaha mengatribusikan kenaikan tersebut pada beberapa penyebab yang mendasar. Jika karyawan mempersepsikan bahwa penjelasan atas kenaikan gaji tersebut adalah fakta bahwa dia adalah seorang pekerja keras lalu mengakibatkan dia menyimpulkan bahwa bekerja keras membuahkan efek positif dalam organisasinya, dia mungkin akan memutuskan untuk terus bekerja keras di masa mendatang.

I.6 Kerangka Konsep

Konsep adalah istilah yang mengekspresikan sebuah ide abstrak yang dibentuk dengan menggeneralisasikan obyek atau hubungan fakta-fakta yang diperoleh dari pengamatan. Konsep sebagai abstraksi yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus. Jadi, konsep merupakan sejumlah ciri atau standar umum suatu obyek (Kriyantono, 2006: 17).

I.6.1 Komunikasi

Komunikasi adalah hal yang paling wajar dalam pola tindakan manusia, tetapi juga paling komplis dan rumit. Bagaimana tidak, komunikasi sudah berlangsung semenjak manusia lahir, dilakukan secara wajar dan leluasa seperti halnya bernafas. Namun ketika harus membujuk, membuat tulisan, mengemukakan pikiran dan menginginkan orang lain bertindak sesuai dengan harapan kita, barulah disadari bahwa komunikasi adalah sebuah disiplin ilmu yang harus dipelajari.

Komunikasi adalah penyampaian informasi atau adanya saling pengertian dari seseorang kepada orang lain. Bagaimana pun komunikasi dipandang penting dalam kehidupan kita, baik sebagai individu maupun sebagai anggota keluarga, organisasi dan sebagai anggota masyarakat (Purba, 2006: 34).

Komunikasi merupakan sebuah “proses” dalam mewujudkan persamaan di antara orang yang melakukan hubungan. Kemudian sebagai sebuah disiplin umum, maka ilmu komunikasi mempelajari dan meneliti tentang perubahan sikap dan pendapat yang diakibatkan oleh informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain.

Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson mengemukakan bahwa komunikasi mempunyai dua fungsi umum. Pertama, untuk kelangsungan hidup diri sendiri yang meliputi: keselamatan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan diri kita sendiri kepada orang lain dan mencapai ambisi pribadi. Kedua, untuk kelangsungan hidup masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat (Mulyana, 2005: 5).

I.6.3 Kompensasi

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa atas upaya-upaya yang telah diberikan kepada perusahaan. Kata-kata yang menarik dalam pengertian kompensasi tersebut adalah ‘balas jasa’. Balas jasa berarti upaya yang membalas terhadap suatu jasa. Bisa saja balasan terhadap suatu jasa diberikan setimpal atau sebanding. Idealnya balasan terhadap suatu jasa diberikan secara setimpal, bukan lebih sedikit dari jasa yang telah diberikan (Arep dkk, 2003: 197).

Komponen-komponen kompensasi dapat dibagi dalam bentuk kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi finansial langsung terdiri dari bayaran yang diperoleh seseorang dalam bentuk gaji, upah, bonus dan komisi. Sedangkan kompensasi tidak langsung yang disebut juga dengan tunjangan, meliputi semua tunjangan finansial yang tidak tercakup dalam kompensasi langsung.

Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin melakukan survei ketenagakerjaan (Sakernas). Lewat Sakernas ini ada informasi terperinci mengenai gaji dan klasifikasi usaha. Data Sakernas tahun 2003 menunjukkan, rata-rata gaji pekerja profesional di Indonesia adalah Rp 1,1 juta per bulan. Sementara survei AJI tahun 2006, menunjukkan 34% wartawan yang bergaji di bawah Rp 1 juta per bulan. Ini berarti banyak wartawan digaji di bawah rata-rata gaji tenaga profesional pada umumnya di Indonesia (Eriyanto, 2006: 19).

I.6.2 Wartawan

Wartawan menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang pers, termuat dalam pasal 4 menyatakan, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Mantan Jaksa Agung, Ali Said dalam Kusumaningrat (2009: 88) menganggap wartawan adalah wakil rakyat tanpa pemilu, sebab pekerjaannya selalu menulis untuk kepentingan rakyat. Kekuasaannya lebih tinggi dari penguasa. Wartawan sering sekali mendapat predikat pendidik informal dan menghibur, sebutan lebih kompleks dari guru dan jenderal. Sedangkan menurut Assegaf (1991: 142) wartawan adalah seseorang yang bekerja dan mendapatkan nafkah sepenuhnya dari media massa berita.

Mengingat beratnya tugas wartawan sehingga ia harus memiliki kriteria-kriteria. Wartawan sebuah profesi yang terbuka bagi siapa saja, pria dan wanita dengan latar belakang pendidikan apa saja. Ada beberapa kriteria wartawan yang baik, antara lain; punya rasa ingin tahu yang besar, berkepribadian, kuat fisik dan mental, punya integritas, berdaya cium berita tinggi, jujur dapat dipercaya, berani, tabah dan tahan uji, cermat, cepat, punya daya imajinasi tinggi, gembira, optimisme, punya rasa humor, punya inisiatif, dan kemampuan menyesuaikan diri (Junaedhie, 1991: 272).

Wartawan adalah suatu profesi yang penuh tanggung jawab dan memiliki resiko yang cukup besar. Untuk profesi semacam ini diperlukan manusia-manusia yang memiliki idealisme dan ketangguhan hati yang kuat untuk menghadapi berbagai kendala, hambatan dan tantangan dalam menjalankan profesinya.

Dibutuhkan suatu komitmen yang khusus menangani perlindungan terhadap profesi kewartawanan yang bekerja secara profesional dan memiliki moralitas, sehingga mampu melakukan pemantauan terhadap pekerjaan wartawan. Profesi wartawan harus

dilindungi karena sangat terkait dengan upaya demokratisasi dan reformasi. Perlindungan terhadap wartawan juga harus diberikan tatkala muncul tekanan-tekanan ekonomis dan tekanan dari kelompok tertentu (Assegaf, 1991: 142).

Setiap wartawan harus menaati Kode Etik Jurnalistik, antara lain (Atmakusumah dalam Tim Penulis AJI, 2003: 7):

- 1) Memperhatikan persyaratan jurnalistik, seperti objektivitas, keadilan, keberimbangan dan ketidakbiasaan.
- 2) Cermat dalam hal akurasi bagi penyampaian fakta-fakta laporannya.
- 3) Menghargai kehidupan pribadi, sepanjang tidak mengganggu atau merugikan kepentingan umum.
- 4) Tidak berprasangka atau diskriminatif terhadap perbedaan SARA atau gender.
- 5) Tidak melecehkan/merendahkan martabat orang-orang yang kurang beruntung.
- 6) Menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan memperoleh informasi.
- 7) Tidak terbujuk oleh iming-iming narasumber yang mengakibatkan sajian berita tidak objektif/profesional.

Selain itu terdapat beberapa kode etik yang jelas-jelas melarang wartawan menerima pemberian narasumber, yaitu dalam:

- a. Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) Pasal 5; “Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi”.
- b. Kode etik Aliansi Jurnalisme Independen (AJI) pasal 13; “Jurnalis dilarang menerima sogokan”.

- c. Kode etik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pasal 4; “Wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat mempengaruhi objektivitas”.

Pada dasarnya wartawan selalu identik dengan pergaulan yang luas. Ada anggapan bahwa profesi sebagai wartawan adalah profesi ‘basah’ karena banyak disegani berbagai kalangan, bahkan berprofesi sebagai wartawan adalah satu-satunya profesi yang kebal hukum. Berbagai kritik tajam tertuju pada wartawan dan semakin mengukuhkan masyarakat bahwa dunia wartawan selalu lekat dengan dunia amplop.

I.6.3 Independensi

Makna “independen” bukan berarti “netral” seperti yang sering disalahpahami oleh publik. Netralitas hanyalah salah satu sikap atau pendirian wartawan dalam kebijaksanaan redaksional ketika hendak menyiarkan pemberitaan. Tetapi independensi wartawan mengandung makna lebih luas dari netralitas, yaitu sikap atau pendirian apa pun termasuk netral atau imparsial sesuai dengan pertimbangan profesional wartawan dengan mengingat tujuan pemberitaan demi kepentingan umum.

Independensi juga berarti bahwa wartawan tidak dapat ditekan oleh campur tangan dari pihak manapun, termasuk dari pemilik perusahaan pers itu sendiri. Kode Etik Jurnalistik yang disepakati oleh 29 organisasi wartawan dan perusahaan pers pada 14 Maret 2006 dan dikukuhkan oleh Dewan Pers pada 24 Maret 2006, menegaskan dalam Pasal 1; “Wartawan Indonesia bersikap independen”. Penafsiran kode etik itu mengatakan; “Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi pihak lain (www.dewanpers.org).

Secara singkat Kovach dan Rosenstiel (2001: 121) mengatakan bahwa seorang wartawan tidak mencari teman dan juga tidak mencari musuh. Walaupun kadang sulit untuk menolak jasa baik seseorang, tetapi bukan berarti menikmati yang ada dan malah akan berada pada posisi dimana independensi wartawan bisa disalahartikan karena kedekatan dengan seorang relasi. Tetapi bukan berarti wartawan menutup diri dengan dunia luar dan tidak melakukan hubungan sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Wartawan bukan seorang yang antisosial hanya berusaha untuk mengurangi hubungan yang dapat mempengaruhi independensinya terhadap sebuah pemberitaan nantinya.

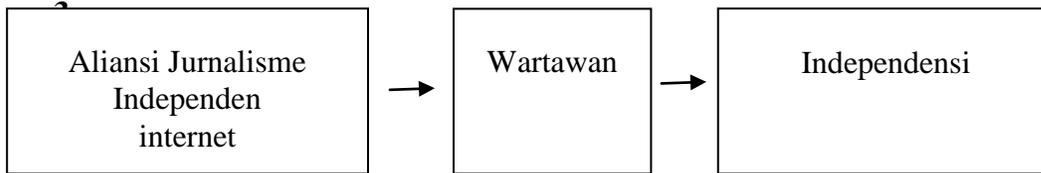
Misal seorang wartawan yang bertugas di sebuah pengadilan memiliki 'hubungan yang terlalu baik' dengan kepala pengadilan, suatu saat terjadi tindak korupsi di pengadilan tersebut oleh sang kepala pengadilan, bukan tidak mungkin kualitas pemberitaan terhadap kepala pengadilan akan berbeda dengan fakta yang sebenarnya hanya karena 'hubungan yang terlalu baik' tersebut. Independensi harus dilakukan dengan bebas nilai ditambah dengan keberanian seorang wartawan untukewartakan kebenaran serta berani untuk melawan berbagai tekanan yang datang kepada mereka (Kovach, 2001: 121).

Agar konsep-konsep dapat diteliti secara empiris, maka harus dioperasionalisasikan dengan mengubahnya menjadi variabel (Singarimbun, 1995: 49).

Adapun variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel gaji wartawan.
2. Variabel independensi.

I.7 Alur Teoritis



Aliansi Jurnalisme Independen sebagai organisasi profesi wartawan yang memiliki misi meningkatkan profesionalisme jurnalis senantiasa bersikap tegas pada anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. AJI juga menyatakan para anggotanya senantiasa menjalankan tugasnya berdasarkan kode etik, sebab itu mereka selektif memilih anggota dan jumlahnya biasa tak banyak.

Salah satu poin kode etik yang saat ini getol dikampanyekan AJI yakni “Tolak Amplop”. Poin ini dianggap penting karena dapat memengaruhi kinerja wartawan di lapangan. Namun bagi wartawan, poin ini amat berat dilakukan di tengah kondisi kesejahteraan yang memprihatinkan saat ini. Anggota AJI sendiri juga kerap melanggar poin yang mereka kampanyekan itu. Aturan ketat yang diterapkan AJI berani mereka langgar demi tuntutan hidup maupun akibat tak sanggup menahan godaan, apalagi melihat wartawan lain di luar anggota AJI yang dapat lebih leluasa untuk menerima.

Padahal poin itu sangat penting karena terbukti seringkali mengubah independensi para wartawan. Wartawan yang melakukan tugasnya tanpa didasari sikap independen sama saja dengan penyebar berita bohong, membuat informasi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Hal ini mencederai nilai dan kode etik jurnalistik. Independensi sebuah karya jurnalistik bergantung pada pribadi wartawan yang menulisnya, siapa pun dia termasuk anggota AJI.

I.10 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang Masalah
- I.2 Perumusan Masalah
- I.3 Pembatasan Masalah
- I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
- I.5 Kerangka Teori
- I.6 Kerangka Konsep
- I.7 Model Teoritis
- I.8 Metodologi Penelitian
- I.9 Sistematika Penulisan

BAB II URAIAN TEORITIS

- II.1 Teori Atribusi
- II.2 Kompensasi
- II.3 Wartawan
- II.4 Independensi

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- III.1 Metode Penelitian
- III.2 Lokasi Penelitian
- III.3 Subjek Penelitian
- III.4 Teknik Pengumpulan Data
- III.5 Teknik Analisis Data
- III.6 Waktu Penelitian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- V.1 Kesimpulan
- V.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1 Komunikasi

Harold Laswell (dalam Effendy, 1991: 10) mendefinisikan komunikasi dengan mencoba menjawab beberapa unsur berikut ini; *Who, Says What, In Which Channel, To Whom, With What Effect*. Ini berarti bahwa komunikasi dalam prosesnya meliputi lima unsur yaitu adanya komunikator yang bertindak sebagai penyampai pesan, pesan, saluran sebagai sarana penyampai pesan, komunikan yang berperan sebagai penerima pesan dan efek yang merupakan umpan balik sebagai reaksi komunikan terhadap pesan yang disampaikan komunikator.

Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa pada dasarnya komunikasi merupakan proses atau pengoperan “sesuatu” berupa lambang atau simbol dalam bentuk informasi, karena kata kunci komunikasi adalah informasi. Sedangkan kegiatan komunikasi yang berlangsung lebih menunjukkan kepada komunikasi interpersonal atau disebut juga proses komunikasi secara primer dengan menggunakan lambang (simbol) sebagai medianya secara langsung mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan komunikator pada komunikan.

Para pakar komunikasi memiliki pendapat berbeda dalam mengemukakan fungsi-fungsi komunikasi, meskipun adakalanya terdapat kesamaan dan tumpang tindih diantara berbagai pendapat tersebut. Thomas M Scheidel (dalam Mulyana, 2002: 4) mengemukakan bahwa kita berkomunikasi terutama untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang di sekitar kita dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir atau berperilaku seperti yang kita inginkan. Namun tujuan dasar kita berkomunikasi adalah untuk mengendalikan lingkungan fisik dan psikologis kita.

Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson mengemukakan bahwa komunikasi mempunyai dua fungsi umum. Pertama, untuk kelangsungan hidup diri sendiri yang meliputi: keselamatan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan diri kita sendiri kepada orang lain dan mencapai ambisi pribadi. Kedua, untuk kelangsungan hidup masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat.

II.1.1 Jurnalistik

Jurnalistik berasal dari kata *journal* atau *dujour* yang merupakan terjemahan dari bahasa Latin *diurnal* yang berarti harian atau setiap hari. Dari perkataan itulah lahir kata jurnalis, yaitu orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik.

See Casper S. Yost (Sa'adah, 1994: 13) menyebut pengertian jurnalistik sebagai suatu kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan, pemrosesan dan pengolahan bahan berita untuk kemudian disebarluaskan. Adapun beberapa syaratnya, yakni:

1. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

2. Kebebasan Pers (*Freedom of the Press*)
3. Merdeka (*Independent*)
4. Kejujuran, Kebebasan, Akurat (*Sincerity, Truthfulness, Accuracy*)
5. Tidak Memihak (*Impartiality*)
6. Berlaku Adil/Jujur, sesuai dengan aturan yang berlaku (*Fair Play*)
7. Kesopanan (*Decency*)

Senada, MacDougall menyebutkan bahwa jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta dan melaporkan peristiwa. Jurnalisme sangat penting di mana pun dan kapan pun. Jurnalisme sangat diperlukan dalam suatu negara demokratis (Kusumaningrat, 2009: 15).

Salah satu karya jurnalistik disebut berita. Berita merupakan bagian yang terpenting dari sebuah media. Ibarat sajian makanan, berita adalah menu utamanya. Orang mengonsumsi media karena ingin memenuhi kebutuhannya akan berita. Menurut Ensiklopedi Pers Indonesia (Junaedhi, 1991: 26), berita adalah laporan pemberitahuan mengenai terjadinya peristiwa atau keadaan yang bersifat umum dan baru saja terjadi yang disampaikan oleh wartawan dalam media massa.

Pendapat senada juga diungkapkan Jacob Oetama (1987: 195), ia berpendapat berita bukanlah fakta. Berita adalah laporan tentang fakta. Suatu peristiwa menjadi berita hanya apabila ditemukan, dilaporkan oleh wartawan dan dimuat pada media yang bersangkutan. Dengan demikian, berita tersebut masuk kepada kesadaran publik hingga akhirnya menjadi pengetahuan publik secara aktual.

Kelengkapan fakta dalam laporan suatu peristiwa merupakan syarat dari suatu berita agar dapat disebut faktual. Sehingga fakta yang disajikan lewat laporan tersebut benar-benar nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh siapapun, langsung di tempat kejadian.

II.2 Teori Atribusi

Atribusi adalah proses menyimpulkan motif, maksud dan karakteristik orang lain dengan melihat pada perilakunya yang tampak (Rakhmat, 2005: 93). Atribusi merupakan masalah yang cukup populer pada dasawarsa terakhir di kalangan psikologi sosial dan agak menggeser fokus pembentukan dan perubahan sikap. Byrne dan Baron (Byrne dkk, 2006: 92) mendefinisikan atribusi sebagai proses di mana kita mengidentifikasi, penyebab perilaku orang lain dan mengetahui *stable traits* dan *disposition* mereka.

Untuk mengetahui perasaan atau *mood* orang lain, dapat berguna dalam banyak hal. Kini saat persepsi sosial menjadi pembahasan, pengetahuan ini hanyalah langkah dasar atau tahap awal. Misalnya kita ingin lebih mengetahui perlakuan orang lain dan mencari tahu apa yang ada di balik perilaku mereka. Para pakar percaya bahwa minat kita mempertanyakan hal ini berasal dari hasrat dasar untuk memahami hubungan sebab akibat di dunia sosial (Pittman, 1993 dalam Byrne dkk, 2006: 92).

Kita tidak hanya ingin tahu bagaimana orang lain berperilaku, tapi kita ingin memahami kenapa mereka melakukan itu, karena kita menyadari bahwa teori ini dapat menolong kita untuk memprediksi bagaimana mereka akan melakukannya di waktu mendatang. Proses kita mendapatkan informasi inilah yang disebut atribusi.

Apabila kita melihat perilaku orang lain, maka kita juga harus melihat apa sebenarnya yang menyebabkan seorang berperilaku seperti itu. Dengan demikian kita harus mempunyai daya prediksi terhadap perilaku orang lain mengapa seseorang bertindak, berperilaku seperti tampak dari perhatian kita, bagaimana mungkin sikapnya selanjutnya.

Secara garis besar ada dua macam atribusi; atribusi kausalitas dan atribusi kejujuran. Sebagai contoh jika kita mengamati perilaku sosial, pertama-tama kita menentukan dahulu apa yang menyebabkannya, faktor situasional atau personal; dalam teori atribusi lazim disebut kausalitas internal. Intinya hanya mempertanyakan perilaku orang lain seperti yang terlihat itu apakah karena faktor situasional atautkah faktor-faktor personal (Liliweri, 1991: 55).

II.2.1 Atribusi Kausalitas

Menurut Kelly (dalam Byrne dkk, 2006: 95) ada tiga cara untuk menjawab pertanyaan mengapa seseorang berperilaku seperti itu, yakni:

- a. **Konsensus**, yaitu memperluas kita melihat apakah orang lain bereaksi dengan stimulus yang ada atau bahkan berperilaku yang sama dengan orang yang kita amati. Semakin tinggi proporsi orang yang bereaksi secara sama, berarti semakin tinggi konsensusnya.
- b. **Konsistensi**, yaitu bagaimana seseorang bereaksi bila dibandingkan dengan orang-orang lain, terhadap stimulus tertentu. Dalam artian sejauh mana orang-orang lain merespon stimulus yang sama dengan cara yang sama dengan orang yang kita atribusi. Misalnya bila A berperilaku tertentu, sedangkan orang-orang lain tidak berbuat demikian, maka dapat dikatakan bahwa konsensus orang yang bersangkutan rendah.
- c. *Distinctiveness* atau kekhususan yaitu bagaimana seseorang merespon dengan cara yang sama atas stimulus atau situasi yang berbeda.

Bila kita melihat perilaku orang lain, kita mencoba memahami apa yang menyebabkan ia berperilaku seperti itu. Fritz Heider (dalam Rakhmat, 2005: 93) mengemukakan, bila kita mengamati perilaku sosial, pertama-tama kita menentukan dahulu apa yang menyebabkannya: faktor situasional atau personal; dalam teori atribusi lazim disebut kausalitas eksternal dan kausalitas internal.

Kita mengatribusikan perilaku orang lain disebabkan internalnya saat konsensus dan *distinctiveness* rendah tapi konsistensi tinggi. Sedangkan jika perilaku seseorang dipengaruhi penyebab eksternal itu karena ketiganya tinggi. Yang terakhir, perilaku seseorang dikatakan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal ketika konsensus rendah tetapi konsistensi dan *distinctiveness* tinggi (Byrne dkk, 2006: 95).

Efek-efek Atribusi Kausalitas (Walgito, 2003:61):

1. Penghargaan tentang masa mendatang

- a. Stabilitas atribusi, yaitu pengharapan atau keyakinan tentang masa mendatang merupakan fungsi dari kinerja masa lalu "*past-performance*" dan stabilitas atribusi terhadap *performance* masa lalu.
- b. Sekte dan perbedaan ras, perempuan cenderung menerangkan keberhasilan atau kegagalan pada faktor di luar dirinya sedangkan laki-laki berpegang pada kemampuan. Hal ini dipengaruhi stereotipe yang berkembang di masyarakat. Ras kulit hitam dipandang lebih rendah kemampuannya dibandingkan orang kulit putih.
- c. *Interpersonal self-fulfilling prophecies*, penghargaan akan performa orang lain dapat menyebabkan orang lain tersebut berperilaku sesuai pengharapan atas dirinya.

2. Evaluasi

Evaluasi berkaitan dengan *reward* (hadiah) dan *punishment* (hukuman). Evaluasi berkaitan dengan usaha dan kemampuan.

3. Motivasi berprestasi

Motivasi prestasi naik: cenderung menilai sukses sebagai hasil dari tingginya kemampuan dan usaha. Motivasi prestasi turun: cenderung menilai sukses pada faktor eksternal dan kegagalan pada faktor internal.

II.3 Kompensasi

Kompensasi adalah konsep remunerasi karyawan yang sangat luas yang meliputi administrasi, gaji dan upah serta tunjangannya, dan pelayanan-pelayanan bagi karyawan (Andrew Sikula dalam Mangkunegara, 2001: 155).

Tujuan kompensasi dalam jangka panjang dapat dibagi kepada tiga bagian besar (Arep dkk, 2003: 197):

1. Memperoleh karyawan yang berkualitas dengan cara menarik karyawan yang handal ke dalam organisasi. Jika kompensasi yang diberikan tinggi, maka banyak orang yang berminat bekerja di tempat tersebut, sehingga seleksi dapat dilakukan dengan cara yang sangat ketat.
2. Meningkatkan gairah dan semangat kerja melalui motivasi karyawan untuk mencapai prestasi unggul. Ini akan berhasil jika insentif yang diterapkan sangat menggiurkan bagi pegawai.
3. Timbulnya *Long Life Employment* (bekerja seumur hidup atau timbul loyalitas dalam bekerja di tempat tersebut).

Dapat disimpulkan bahwa kompensasi bertujuan untuk memperoleh SDM yang berkualitas dan mempertahankan SDM yang ada saat ini. Seringkali dijumpai dalam praktik sehari-hari bahwa SDM yang berkualitas tidak dapat diperoleh karena sistem kompensasi yang tidak menarik. Selain itu, banyak kasus dimana SDM yang berkualitas malah keluar setelah diperoleh dengan susah payah akibat sistem kompensasi yang tidak menarik itu.

Prinsip kompensasi yang harus dipenuhi dan tidak bisa ditawar-tawar lagi adalah adil dan layak. Adil tapi tidak layak bukanlah kompensasi yang baik. Sebaliknya, layak tapi tidak adil hanya akan membuat masalah baru di kalangan karyawan sendiri.

Proses kompensasi dimulai dengan kegiatan analisis pekerjaan. Hasil analisis pekerjaan adalah deskripsi dan spesifikasi pekerjaan dan selanjutnya standar-standar pekerjaan. Di sisi lain, harus diketahui peraturan upah minimum sebagai batas minimal yang tidak boleh dilanggar. Berdasarkan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan, dilakukan survei sistem pengupahan di perusahaan-perusahaan lain sehingga menghasilkan struktur upah di perusahaan. Struktur upah yang dilakukan digunakan sebagai bahan untuk membuat aturan-aturan organisasi. Selanjutnya dengan dihubungkannya standar pekerjaan dengan aturan-aturan administrasi, maka dilaksanakanlah penilaian prestasi kerja karyawan. Pada akhirnya, berdasarkan prestasi karyawan, dibayarkanlah upah karyawan yang bersangkutan.

Selain gaji atau upah, penghargaan yang diberikan juga termasuk dalam sistem kompensasi, Kompensasi juga ditujukan untuk memotivasi pekerja yang biasanya diberikan dalam bentuk insentif. Sehingga secara garis besar kompensasi itu terdiri dari tiga jenis:

1. Kompensasi langsung

Adalah penghargaan yang berupa gaji/upah yang dibayar secara tetap berdasarkan tenggang waktu yang tetap.

2. Kompensasi tidak langsung

Adalah pemberian bagian keuntungan atau manfaat lainnya bagi para pekerjaan di luar gaji/upah tetap, dapat berupa uang atau barang.

3. Insentif

Adalah penghargaan yang diberikan untuk memotivasi para pekerja agar produktivitas kerjanya tinggi, sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu.

II.3.1 Kompensasi Langsung

Kompensasi langsung merupakan upah dan gaji yang dibayarkan kepada karyawan. Ada beberapa cara penghitungan atau pertimbangan dasar dalam melakukan penyusunan upah dan gaji, antara lain:

- a. Upah menurut prestasi kerja.
- b. Upah menurut lama kerja.
- c. Upah menurut senioritas.
- d. Upah menurut kebutuhan.

Untuk melakukan penggajian yang tepat, perlu dilakukan survei penggajian yang dilakukan oleh perusahaan. Survei yang dilakukan menyangkut berapa besarnya gaji yang diterima dengan poin-poin tertentu.

II.3.2 Kompensasi Tidak Langsung

Kompensasi tidak langsung dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

- 1) Jaminan keamanan dan kesejahteraan kerja.
- 2) Pembayaran upah selama tidak bekerja.
- 3) Pelayanan bagi pekerja.

Yang termasuk kompensasi tidak langsung ini adalah kompensasi pelengkap. Kompensasi pelengkap merupakan salah satu bentuk pemberian kompensasi berupa penyediaan paket dan program pelayanan karyawan, dengan maksud untuk mempertahankan keberadaan karyawan dalam jangka panjang.

II.3.3 Insentif

Insentif tujuannya diberikan untuk memotivasi pegawai. Insentif tidak hanya dalam bentuk fisik seperti uang saja namun juga bisa dalam bentuk non fisik, misalnya kebutuhan emosi dan intelektual.

Gaji tidak secara otomatis menjamin orang menyukai pekerjaannya. Dalam memotivasi pegawai, perlu dilakukan beberapa kombinasi yang tepat dan diberikan pada waktu yang tepat pula. Kombinasi tersebut yakni antara kebutuhan fisik dan non fisik.

Beberapa sifat dasar dalam sistem pengupahan insentif yakni:

- a) Pembayaranannya diupayakan agar cukup sederhana sehingga dimengerti dan dihitung oleh karyawan yang bersangkutan.
- b) Upah insentif yang diterima benar-benar dapat menaikkan motivasi kerja sehingga efisiensi kerja juga meningkat.
- c) Pelaksanaan pengupahan insentif hendaknya cukup cepat sehingga karyawan yang berprestasi lebih, cepat merasakannya.
- d) Penentuan standar kerja ataupun produksi hendaknya secermat mungkin.

II.4 Wartawan

Wartawan atau jurnalis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi IV tahun 2008 disebutkan sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio dan televisi; juru warta; jurnalis. Sedangkan Pasal 1 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers mendefinisikan wartawan sebagai orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Pengertian jurnalis menurut AJI yakni profesi atau penamaan seseorang yang pekerjaannya berhubungan dengan isi media massa. Jurnalis meliputi juga kolumnis, penulis lepas, [fotografer](#) dan [desain grafis](#) editorial. Sementara itu wartawan, dalam pendefinisian [Persatuan Wartawan Indonesia](#) (PWI), hubungannya dengan kegiatan tulis menulis yang di antaranya mencari data (riset, liputan, verifikasi) untuk melengkapi laporannya.

Istilah jurnalis baru muncul di Indonesia setelah masuknya pengaruh ilmu komunikasi yang cenderung berkiblat ke [Amerika Serikat](#). Istilah ini kemudian berimbas pada penamaan seputar posisi-posisi kewartawanan. Misalnya, "redaktur" menjadi "editor." Pada awal [abad ke-19](#), jurnalis berarti seseorang yang menulis untuk [jurnal](#), seperti [Charles Dickens](#) pada awal kariernya. Dalam abad terakhir ini artinya telah menjadi seorang penulis untuk koran dan juga majalah.

Banyak orang mengira jurnalis sama dengan reporter, seseorang yang mengumpulkan informasi dan menciptakan laporan atau cerita. Tetapi, hal ini tidak benar karena ia tidak meliputi tipe jurnalis lainnya, seperti kolumnis, penulis utama, [fotografer](#) dan desain editorial.

Profesi sebagai wartawan untuk memburu berita tentu tak semua orang dapat melakukannya. Wartawan membutuhkan seperangkat pengetahuan dan metode tertentu dalam meliput kejadiannya. Tak heran jika Ignas Kleden menyebut pekerjaan sebagai wartawan adalah pekerjaan intelektual.

Kleden menyebutkan pekerjaan seorang wartawan bukan pekerjaan teknis melainkan pekerjaan intelektual. Berita yang disajikan dalam koran misalnya, bukanlah

reproduksi mekanis dari sebuah peristiwa, melainkan hasil pergulatan dan dialektika yang intens antara peristiwa tersebut dengan persepsi dan kesadaran sang wartawan. Dengan berpegang pada “abc” teknis tentang penyusunan berita ternyata sang wartawan harus bergulat dengan beberapa segi lain yang melibatkan tanggung jawab sosial dan integritas intelektualnya; bagaimana menyampaikan berita itu sehingga sanggup mencerminkan keadaan sebenarnya tetapi sekaligus mempertimbangkan manfaat dan kebaikan yang diberikan oleh pemberitaan itu terhadap masyarakat pembaca, sambil memberi perspektif dan warna pemberitaan yang mencerminkan nilai yang dianut oleh wartawan atau koran yang melayaninya (Kleden, 1987 dalam Nurudin, 2009: 138).

Tak bisa dipungkiri bahwa wartawan adalah seorang ilmuwan. Kalau ilmuwan bertanggung jawab dalam memberikan pengetahuan ke masyarakat, wartawan juga tak jauh berbeda. Bedanya, wartawan dengan informasi yang disajikannya ikut menambah pengetahuan masyarakat. Bahkan memberikan perspektif baru layaknya ilmuwan. Wartawan juga seorang pendidik, seperti ilmuwan. Kalau ilmuwan dengan ilmunya bisa mencerdaskan masyarakat, wartawan dengan informasinya juga tidak jauh berbeda.

Wartawan, juga mampu mempertimbangkan manfaat dan kebaikan yang diberikan masyarakat. Kalau pada kenyataannya informasi yang diberikan wartawan itu menyesatkan, bukan salah profesi kewartawanan tetapi salah individu wartawannya (Nurudin, 2009: 138).

Broder, seorang wartawan asal Amerika Serikat mengatakan, “Kebanyakan orang yang berakal sehat tidak akan memilih kewartawanan sebagai kariernya. Pekerjaan ini memberikan keuntungan yang berlimpah-limpah, tetapi disertai dengan biaya dan resiko yang sepadan. Di ujung ekstrim anda bisa ditembak dan tewas, seperti yang dialami

banyak wartawan di medan perang; Anda juga bisa diancam dan dikucilkan, seperti banyak wartawan pada masa perjuangan persamaan hak. Tugas kami lebih berat bagi keluarga kami, ketimbang bagi kami sendiri. Angka perceraian tinggi dan mereka yang tetap menikah harus menerima kenyataan tidak bisa makan bersama, berakhir pekan bersama, berlibur bersama. Ketegangan ini muncul karena sebagai wartawan kami mendahulukan pencarian dan penyiaran berita. Kami merasakan daya tarik hubungan kekeluargaan; sahabat; loyalitas terhadap suku, agama, ras dan bangsa; serta pandangan sosial, politik kami sebagai partisan. Tetapi kami merumuskan diri kami menurut panggilan kami dan kami menyelesaikan sebagian besar konflik kami dengan menjadikan sasaran itu sebagai yang paling penting” (Broder, 1992: 391).

Dewan Pers (Nurudin, 2009:138) pernah memberikan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang wartawan, antara lain:

1. Pemahaman terhadap etika jurnalistik, hukum dan ketentuan lain yang mengatur media massa.
2. Pengetahuan dan kepekaan terhadap aspek-aspek kehidupan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
3. Kemampuan teknis dalam mencari, mengolah, menulis dan menyampaikan berita/artikel atau laporan melalui media massa, sesuai dengan kode etik jurnalistik.
4. Kemampuan mengelola dan mengembangkan usaha penerbitan media cetak atau elektronik.
5. Kemampuan melakukan penelitian di bidang media massa.

Melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers harus menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memiliki Kode Etik Jurnalistik yang harus dipatuhi (lihat lampiran).

II.5 Independensi

Independensi menurut KBBI edisi IV tahun 2008 adalah keadaan yang tidak bergantung kepada orang lain, keadaan tidak merdeka, tidak di bawah kekuasaan atau pengaruh negara lain. Sehingga jurnalis independen adalah jurnalis yang mandiri, merdeka dan tak bergantung kepada pihak mana pun. Ia punya sikap mandiri untuk mempertahankan prinsip kebenaran.

Kovach dan Rosenstiel (Kovach, 2001: 123) menempatkan independensi sebagai prinsip atau elemen keempat jurnalisisme. Independensi bagi wartawan berada pada semangat dan pikirannya. Wartawan seharusnya tidak netral melainkan bersikap dalam karyanya. Independensi diukur dari kredibilitas. Kredibilitas mereka berakar pada akurasi, verifikasi dan kepentingan publik yang lebih besar dan hasrat untuk menyampaikan informasi.

Bersikap independen bukan berarti netral atau berimbang. Tapi berimbang maupun tidak berat sebelah (*fairness*) adalah metode. Bukan tujuan. Keseimbangan bisa menimbulkan distorsi bila dianggap sebagai tujuan. Kebenaran bisa kabur di tengah liputan yang berimbang. *Fairness* juga bisa disalahmengerti bila dianggap sebagai tujuan. *Fair* terhadap sumber atau *fair* terhadap pembaca?

Menjadi netral bukanlah prinsip dasar jurnalisisme. Imparsialitas juga bukan yang dimaksud dengan objektivitas. Prinsipnya, wartawan harus bersikap independen terhadap orang-orang yang mereka liput. Independensi merupakan hal tersulit untuk dipertahankan manakala seseorang berhadapan dengan pihak di mana kita memiliki kepentingan dan secara emosi menjadi bagian darinya. Masihkah independensi terjaga ketika harus

berhadapan dengan keluarga, rekan, majikan atau lawan-lawan kita? Dengan orang yang sudah memberi uang dan kita anggap baik? Pandangan bisa menjadi bias kemudian tidak objektif lagi. Memberi simpati berlebih. Terhadap lawan-lawan kita juga tidak objektif, namun menilainya dengan nada antipati (Harsono, 2010: 25).

Independensi yang dimaksud di sini adalah independensi pikiran, dari kelas atau status ekonomi dan independensi dari ras, etnis, agama dan gender. Ini berarti wartawan dalam menulis berita melepaskan semua yang ada pada dirinya. Ia bertugas melaporkan dan menunjukkan fakta apa adanya, tanpa takut pada sebuah kelompok.

Kunci independensi bagi jurnalis adalah setia pada kebenaran. Kesetiaan inilah yang membedakan wartawan dengan juru penerangan atau propaganda. Independensi ini juga yang harus dijunjung tinggi di atas identitas lain seorang wartawan. Ada wartawan yang beragama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, berkulit putih, keturunan Asia, keturunan Afrika, Hispanik, cacat, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, dan sebagainya. Latar belakang etnik, agama atau kelas seyogyanya dijadikan bahan informasi buat liputan mereka. Bukan alasan untuk mendikte si wartawan (Harsono, 2010: 26).

Dalam beberapa hal, independensi lebih berakar dalam pragmatisme ketimbang teori. Orang mungkin membayangkan bahwa wartawan bisa melaporkan sekaligus menjadi peserta dalam peristiwa tersebut, tetapi realitasnya menjadi peserta mengaburkan semua tugas lain yang harus dilakukannya. Melihat yang terjadi dari perspektif lain akan kian sulit. Menjadi kian sulit pula, malah mungkin mustahil, untuk selanjutnya meyakinkan audiens bahwa ia mendahulukan kepentingan mereka di atas kepentingan tim tempat wartawan tersebut bekerja. Dengan kata lain, wartawan bisa saja menjadi penasihat bayangan, penulis pidato atau menerima uang dari mereka yang anda tulis

beritanya. Namun adalah sebuah arogansi dan mungkin naif serta khayali, bahwa hal ini tidak berpengaruh pada pekerjaan anda sebagai wartawan (Kovach, 2001: 123).

Seorang wartawan tidak mencari teman, tidak juga mencari musuh. Terkadang memang sulit menerima tawaran jasa baik, misalnya diantar pulang ketika kesulitan cari taksi, tapi juga tak perlu datang ke acara-acara sosial di mana independensi wartawan bisa salah dimengerti orang karena ada saja pertemanan yang terbentuk lewat acara-acara itu (Kovach dalam Harsono, 2010: 24).

II.5.1 Independensi dan “Amplop”

Independensi ini bisa diwujudkan jika jurnalis tidak punya ikatan dengan narasumber. Hadiah, perlakuan istimewa, biaya perjalanan dapat memengaruhi kerja jurnalis. Oleh karena itu, seorang jurnalis harus berani menolaknya. Tanpa kemampuan tersebut, kerja jurnalis akan direndahkan. Apalagi saat ini semakin maraknya “budaya amplop”, wartawan “muntaber” (muncul tanpa berita) atau “wartawan bodrek” yakni jurnalis yang senang dengan “amplop”. Di samping akan memengaruhi kerja wartawan, di mata narasumber profesionalisme wartawan tersebut sudah jatuh. Misalnya ungkapan, “Tidak usah bingung atau takut pada wartawan, sediakan ‘amplop’ saja mereka akan diam.” Anehnya budaya seperti itu masih sulit dihilangkan, baik karena kebutuhan wartawan akan uang atau kepentingan narasumber/institusi agar berita yang disiarkan yang baik-baik saja. “Wartawan bodrek” atau WTS (Wartawan Tanpa Surat Kabar) umumnya melanda media massa yang belum mapan dan belum bisa menggaji wartawannya cukup. Wartawan yang melakukan “tindakan tercela” seperti ini tidak bisa independen dari narasumber (Nurudin, 2009: 110).

Besarnya pengaruh “amplop” pada independensi wartawan di Indonesia sudah berlangsung lama. Pada tahun 1976, Jaksa Agung Ali Said (Panuju, 2005: 45) mengatakan di depan wartawan, “Jika Napoleon Bonaparte lebih takut pada satu orang wartawan daripada seratus divisi tentara, saya lebih takut kepada sepuluh tentara daripada seratus wartawan, karena seratus wartawan bisa dihadapi dengan amplop”.

Perilaku menerima amplop jelas dilarang bagi wartawan. Dalam Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia disebutkan wartawan Indonesia tidak menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan berita, tulisan atau gambar yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang atau suatu pihak (pasal 4).

Sementara itu Kode Etik AJI lebih tegas menyatakan perang terhadap wartawan amplop, jurnalis tidak dibenarkan menerima sogokan. Yang dimaksud sogokan yakni semua bentuk pemberian uang, barang dan atau fasilitas lain yang secara langsung, dapat memengaruhi jurnalis dalam membuat kerja jurnalistik (butir 14).

Salah satu motif wartawan menerima amplop yakni tuntutan ekonomi. Sudah bukan rahasia lagi bahwa imbalan yang resmi diperoleh wartawan Indonesia belum memadai. Menurut survei yang dilakukan majalah Asiaweek tahun 2000, jumlah gaji jurnalis Indonesia yang paling rendah untuk kawasan tersebut karena mereka hanya digaji 102 US Dolar sebulan atau di bawah gaji *lawyer*. Masih kalah jauh dibandingkan gaji jurnalis China (193 US Dolar), Filipina (249 US Dolar), India (321 US Dolar), Thailand (357 US Dolar), Malaysia (1.125 US Dolar) dan Taiwan (1.608 US Dolar). Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara supermakmur seperti Singapura, Hongkong, Australia dan Jepang, maka gaji jurnalis Indonesia kelihatan rendah sekali (Panuju, 2005: 46).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

III.1. Metode Penelitian yang Digunakan

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Penelitian mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis (Singarimbun, 1995).

Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Metode ini juga tidak mencari atau menjelaskan hubungan, serta tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi (Rakhmat, 2004:34). Seperti juga teori, metodologi diukur berdasarkan kemanfaatannya dan tidak bisa dinilai apakah suatu metode benar atau salah. Untuk menelaah hasil penelitian secara benar, kita tidak cukup

sekedar melihat apa yang ditemukan peneliti, tetapi juga bagaimana peneliti sampai pada temuannya berdasarkan kelebihan dan keterbatasan metode yang digunakannya.

III.2. Lokasi Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tempat penelitian yang jelas. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan lingkup wilayah AJI Cabang Medan.

Terkadang penelitian ini juga menyesuaikan dengan kesediaan waktu dan tempat informan berada, sehingga peneliti mengikuti kehendak informan dalam menentukan tempat untuk melakukan wawancara. Jadi tempat wawancara juga bisa terjadi di luar wilayah Medan.

III.3. Subjek dan Informan Penelitian

Riset kualitatif tidak bertujuan untuk membuat generalisasi hasil riset. Hasil riset lebih bersifat kontekstual dan kasuistik, yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu sewaktu penelitian dilakukan. Karena itu, pada riset kualitatif tidak dikenal istilah sampel. Sampel pada riset kualitatif disebut subjek penelitian atau informan, yaitu orang-orang yang dipilih untuk diwawancarai atau diobservasi sesuai tujuan riset. Disebut subjek riset bukan objek karena informan dianggap aktif mengkonstruksi realitas, bukan sekedar objek yang hanya mengisi kuesioner (Kriyantono, 2007: 161).

Merujuk pada hal tersebut, penelitian ini menggunakan teknik sampling snowball. Teknik ini banyak ditemui dalam riset kualitatif, misalnya riset eksplorasi. Sesuai namanya, teknik ini bagaikan bola salju yang turun menggelinding dari puncak

gunung ke lembah, semakin lama semakin membesar ukurannya (Kriyantono, 2008: 158-159). Jadi, teknik ini merupakan teknik penentuan informan yang awalnya berjumlah kecil, kemudian berkembang semakin banyak. Orang yang dijadikan informan pertama diminta memilih atau menunjuk orang lain untuk dijadikan informan berikutnya, begitu pula seterusnya sampai jumlahnya lebih banyak. Proses ini baru berakhir bila periset merasa data telah jenuh, artinya periset merasa tidak lagi menemukan yang baru dari wawancara tersebut.

Subjek penelitian adalah organisasi Aliansi Jurnalisme Independen (AJI) cabang Medan sebagai sebuah organisasi profesi jurnalis, yang menggalakkan standar gaji wartawan dan menegaskan anggotanya untuk menolak amplop. Sedangkan narasumber dalam penelitian ini adalah wartawan yang termasuk anggota AJI cabang Medan dan pengurus organisasi tersebut. Saat ini anggota AJI cabang Medan tercatat sebanyak 50 orang. Namun dari seluruh anggota tersebut beberapa di antaranya merupakan wartawan *freelance* dan tidak bekerja di perusahaan pers, sehingga tidak termasuk sebagai obyek penelitian.

III.3.1. Sejarah Aliansi Jurnalis Independen

Deskripsi tentang sejarah, visi dan misi dan berbagai hal tentang AJI berikut ini (kecuali sejarah AJI Medan) peneliti dapat dari hasil wawancara dengan Koordinator Divisi Serikat Pekerja AJI Indonesia, Winuranto Adhi pada tanggal 7 Maret 2011 di Jakarta, serta dari beberapa data tambahan yang dikirimkan pihak AJI Pusat via surat elektronik.

AJI lahir sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rejim Orde Baru. Mulanya adalah pembredelan Detik, Editor dan Tempo, 21 Juni 1994. Ketiganya dibredel karena pemberitaannya yang tergolong kritis kepada penguasa. Tindakan represif inilah yang memicu aksi solidaritas sekaligus perlawanan dari banyak kalangan secara merata di sejumlah kota.

Gerakan perlawanan terus mengkristal. Akhirnya, sekitar 100 orang yang terdiri dari jurnalis dan kolumnis berkumpul di Sirnagalih, Bogor, 7 Agustus 1994. Pada hari itulah mereka menandatangani Deklarasi Sirnagalih. Inti deklarasi ini adalah menuntut dipenuhinya hak publik atas informasi, menentang pengekangan pers, menolak wadah tunggal untuk jurnalis, serta mengumumkan berdirinya AJI.

Pada masa Orde Baru, AJI masuk dalam daftar organisasi terlarang. Karena itu, operasi organisasi ini di bawah tanah. Roda organisasi dijalankan oleh dua puluhan jurnalis-aktivis. Untuk menghindari tekanan aparat keamanan, sistem manajemen dan pengorganisasian diselenggarakan secara tertutup. Sistem kerja organisasi semacam itu memang sangat efektif untuk menjalankan misi organisasi, apalagi pada saat itu AJI hanya memiliki anggota kurang dari 200 jurnalis.

Selain demonstrasi dan mengancam tindakan represif terhadap media, organisasi yang dibidani oleh individu dan aktivis Forum Wartawan Independen (FOWI) Bandung, Forum Diskusi Wartawan Yogyakarta (FDWY), Surabaya Press Club (SPC) dan Solidaritas Jurnalis Independen (SJI) Jakarta ini juga menerbitkan majalah alternatif Independen, yang kemudian menjadi Suara Independen.

Gerakan bawah tanah ini harus dibayar mahal. Tiga anggota AJI, yaitu Ahmad Taufik, Eko Maryadi dan Danang Kukuh Wardoyo dijebloskan ke penjara, Maret 1995.

Taufik dan Eko masuk bui masing-masing selama 3 tahun, Danang 20 bulan. Menyusul kemudian Andi Syahputra, mitra penerbit AJI, yang masuk penjara selama 18 bulan sejak Oktober 1996.

Para aktivis AJI yang bekerja di media dibatasi ruang geraknya. Pejabat Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia juga tidak segan-segan menekan para pemimpin redaksi agar tidak memperkerjakan mereka di medianya.

Konsistensi dalam memperjuangkan misi inilah yang menempatkan AJI berada dalam barisan kelompok yang mendorong demokratisasi dan menentang otoritarianisme. Inilah yang membuahkan pengakuan dari elemen gerakan pro demokrasi di Indonesia, sehingga AJI dikenal sebagai pembela kebebasan pers dan berekspresi.

Pengakuan tak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari manca negara. Diantaranya dari International Federation of Journalist (IFJ), Article XIX dan International Freedom Expression Exchange (IFEX). Ketiga organisasi internasional tersebut kemudian menjadi mitra kerja AJI. Selain itu banyak organisasi-organisasi asing, khususnya NGO internasional, yang mendukung aktivitas AJI. Termasuk badan-badan PBB yang berkantor di Indonesia.

AJI diterima secara resmi menjadi anggota IFJ, organisasi jurnalis terbesar dan paling berpengaruh di dunia, yang bermarkas di Brussels, Belgia, pada 18 Oktober 1995. Aktivis lembaga ini juga mendapat beberapa penghargaan dari dunia internasional. Di antaranya dari Committee to Protect Journalist (CPJ), The Freedom Forum (AS), International Press Institute (IPI-Wina) dan The Global Network of Editors and Media Executive (Zurich).

Setelah Soeharto jatuh, pers mulai menikmati kebebasan. Jumlah penerbitan

meningkat. Setelah reformasi, tercatat ada 1.398 penerbitan baru. Namun, hingga tahun 2000, hanya 487 penerbitan saja yang terbit. Penutupan media ini meninggalkan masalah perburuhan. AJI melakukan advokasi dan pembelaan atas beberapa pekerja pers yang banyak di-PHK saat itu.

III.3.2. Sejarah Aliansi Jurnalis Independen Cabang Medan

Deskripsi sejarah AJI Medan ini merupakan hasil wawancara dengan salah satu pendiri AJI Medan, Bambang Soedjiartono pada 8 Juli 2011 di Medan. Pria yang akrab disapa Bambang Soed itu, saat ini bekerja di Harian Tribun Medan sebagai Redaktur Khusus.

AJI Medan resmi berdiri pada tanggal 9 September 1998. Organisasi ini didirikan beberapa orang jurnalis, pasca reformasi. Saat itu bersamaan dengan pelatihan jurnalistik yang digelar Institut Studi Arus Informasi. Pada akhir kegiatan, dilakukan deklarasi pembentukan AJI Medan, dengan ketua M Samin Pardede. Pelantikan kemudian berlangsung di Hotel Garuda Plaza dengan total jumlah anggota 16 orang.

Beberapa orang jurnalis yang berperan mendirikan AJI Medan diantaranya, Bambang Soed, M Samin Pardede, Choking Susilo Sakeh, Edrin Adliansyah, Porman Wilson Manalu, serta beberapa jurnalis lain. Berdirinya AJI Medan berawal dari kesamaan visi mereka, yakni ingin menjadi jurnalis yang profesional dan bertanggung jawab kepada pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Selain itu juga tidak menjadi alat pemerintah.

Pengurus AJI Medan periode pertama itu kemudian menetapkan tiga tujuan yang ingin dicapai AJI Medan. Tujuan pertama mereka, ingin merekrut anggota-anggota yang

peduli dengan nasib bangsa. Kemudian memberi pemahaman pada para jurnalis agar lebih menghargai profesinya. Serta yang ketiga, mengenalkan kepada masyarakat bahwa wartawan itu bukan seorang pemeras dan tidak menerima amplop.

Berbagai tantangan dihadapi AJI Medan yang baru terbentuk saat itu. Situasi pasca reformasi yang masih hangat menyebabkan mereka kerap menjadi korban tindakan represif aparat, hampir setiap pertemuan anggota AJI Medan, masih disatroni aparat. Selain itu tantangan yang harus dihadapi, ketika berbenturan dengan kehidupan pers di Sumatera Utara yang saat itu karut marut. Ada pers mafia serta perusahaan-perusahaan pers yang tidak jelas.

III.3.3. Visi dan Misi Aliansi Jurnalis Independen

Setelah rezim Orde Baru tumbang oleh “Revolusi Mei 1998”, kini Indonesia mulai memasuki era keterbukaan. Rakyat Indonesia, termasuk jurnalis, juga mulai menikmati kebebasan berbicara, berkumpul dan berorganisasi. Departemen Penerangan, yang dulu dikenal sebagai lembaga pengontrol media, dibubarkan. Undang-Undang Pers pun diperbaiki sehingga menghapus ketentuan-ketentuan yang menghalangi kebebasan pers.

AJI, yang dulu menjadi organisasi terlarang, kini mendapat keleluasaan bergerak. Jurnalis yang tadinya enggan berhubungan dengan AJI, atau hanya bisa bersimpati, mulai berani bergabung. Jumlah anggotanya pun bertambah. Perkembangan jumlah anggota akibat perubahan sistem politik ini, tentu saja, juga mengubah pola kerja organisasi AJI.

AJI kini tak bisa lagi sekedar mengandalkan idealisme dan semangat para aktivisnya untuk menjalankan visi dan misi organisasi. Pada akhirnya, organisasi ini

mulai digarap secara profesional. Bukan hanya karena jumlah anggotanya yang semakin banyak, namun tantangan dan masalah yang dihadapi semakin berat dan kompleks.

Sejak berdirinya, AJI mempunyai komitmen untuk memperjuangkan hak-hak publik atas informasi dan kebebasan pers. Untuk yang pertama, AJI memposisikan dirinya sebagai bagian dari publik yang berjuang mendapatkan segala macam informasi yang menyangkut kepentingan publik.

Mengenai fungsi sebagai organisasi pers dan jurnalis, AJI gigih memperjuangkan dan mempertahankan kebebasan pers. Muara dari dua komitmen ini adalah terpenuhinya kebutuhan publik akan informasi yang objektif.

Untuk menjaga kebebasan pers, AJI berupaya menciptakan iklim pers yang sehat. Suatu keadaan yang ditandai dengan sikap jurnalis yang profesional, patuh kepada etika dan mendapatkan kesejahteraan yang layak. Ketiga soal ini saling terkait. Profesionalisme ditambah kepatuhan pada etika tidak mungkin bisa berkembang tanpa diimbangi oleh kesejahteraan yang memadai. Menurut AJI, kesejahteraan jurnalis yang memadai ikut mempengaruhi jurnalis untuk bekerja profesional, patuh pada etika dan bersikap independen.

Program kerja yang dijalankan AJI untuk membangun komitmen tersebut, antara lain dengan sosialisasi nilai-nilai ideal jurnalisisme dan kesadaran atas hak-hak ekonomi pekerja pers. Sosialisasi dilakukan antara lain dengan pelatihan jurnalistik, diskusi, seminar serta penerbitan hasil-hasil pengkajian dan penelitian soal pers. Sedang program pembelaan terhadap hak-hak pekerja pers, antara lain dilakukan lewat advokasi, bantuan hukum dan bantuan kemanusiaan untuk mereka yang mengalami represi, baik oleh perusahaan pers, institusi negara maupun oleh kelompok-kelompok masyarakat.

Berdasarkan keputusan Kongres AJI ke-V di Bogor, 17-20 Oktober 2003, ditetapkan bahwa bentuk organisasi AJI adalah perkumpulan. Namun, AJI Kota (seperti AJI Medan, AJI Surabaya, AJI Makassar dan lainnya) mempunyai otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri, kecuali dalam hal (1) berhubungan dengan IFJ, organisasi internasional tempat AJI berafiliasi dan pihak-pihak internasional lainnya; serta (2) mengangkat dan memberhentikan anggota.

Kekuasaan tertinggi AJI ada di tangan kongres yang digelar setiap dua tahun sekali. AJI dijalankan oleh pengurus harian dibantu Dewan Nasional yang diangkat oleh Kongres. Dewan Nasional diisi perwakilan AJI kota. Dalam menjalankan kepengurusan organisasi, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI dibantu oleh enam koordinator divisi beserta anggotanya dan dua Biro, yang didukung pula oleh manajer kantor serta staf pendukung.

Untuk mengontrol penggunaan dana organisasi dibentuklah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang anggotanya dipilih oleh Kongres. Majelis Kode Etik juga dipilih melalui Kongres. Tugas lembaga ini adalah memberi saran dan rekomendasi kepada pengurus harian atas masalah-masalah pelanggaran kode etik organisasi yang dilakukan oleh pengurus maupun anggota.

Kepengurusan sehari-hari AJI Kota dilakukan oleh Pengurus Harian AJI Kota, yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa koordinator divisi. Mereka dipilih lewat Konferensi AJI Kota yang dilangsungkan setiap dua tahun sekali.

AJI membuka diri bagi setiap jurnalis Indonesia yang secara sukarela berminat menjadi anggota. Syarat terpenting adalah menyatakan bersedia menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik AJI.

III.3.4. Aliansi Jurnalis Independen dan Upah Layak

Pada 20 Januari 2011, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) meluncurkan upah layak jurnalis 2011 secara serentak di 16 kota cabang AJI: Jakarta, Surabaya, Kediri, Semarang, Yogyakarta, Medan, Bandar Lampung, Pontianak, Batam, Pekanbaru, Makassar, Kendari, Palu, Denpasar, Kupang dan Jayapura. Peluncuran upah layak jurnalis secara serentak ini menjadi bagian dari kampanye perjuangan AJI dalam meningkatkan profesionalisme jurnalis yang kerap terbentur dengan kesejahteraan yang tidak layak.

Di kota-kota tersebut, mulai Desember 2010-pertengahan Januari 2011, AJI menyurvei standar upah layak jurnalis berdasarkan komponen dan harga kebutuhan hidup layak, dengan mengukur perubahan biaya hidup (*living cost*) seiring kenaikan harga barang di pasaran yang sesuai dengan kebutuhan seorang jurnalis. AJI menolak menggunakan standar Upah Minimum Kota (UMK) yang masih kerap digunakan perusahaan media sebagai patokan untuk menggaji jurnalisnya.

Kebutuhan pangan, sandang, papan, hingga aneka kebutuhan lain (transportasi, komunikasi, estetika, bacaan, rekreasi, hingga sosial kemasyarakatan), dimasukkan dalam komponen upah layak ini. AJI juga memasukkan komponen laptop yang pembayarannya dicicil antara dua hingga tiga tahun. Menurut AJI, komputer jinjing bukanlah barang mewah bagi jurnalis, melainkan kebutuhan riil jurnalis untuk menunjang kinerja di lapangan yang makin dituntut lebih cepat dalam menyajikan informasi. AJI pun memasukkan tabungan 10 pesen yang diperoleh dari total upah layak jurnalis.

Berdasarkan hasil survei di setiap kota, upah layak yang mestinya diberikan kepada jurnalis muda yang baru diangkat menjadi karyawan tetap adalah Jakarta Rp 4.748.919; Surabaya Rp 3.864.850; Kediri Rp 2.836.557, Semarang Rp 3.240.081; Yogyakarta Rp 3.147.980; Medan Rp 3.816.120; Bandar Lampung Rp 2.568.462; Pontianak Rp 3.526.600; Batam Rp 4.243.030; Pekanbaru Rp 3.604.700; Makassar Rp 4.037.226; Kendari Rp 2.972.000; Palu Rp 2.150.066; Denpasar Rp 3.894.583; Kupang Rp 3.929.228; dan Jayapura Rp 6.414.320. Di kota-kota besar atau kota tertentu yang memiliki tingkat harga kebutuhan hidup tinggi, seperti Jakarta, Denpasar, Batam, Jayapura dan Kupang, ditemukan angka upah layak yang semakin tinggi.

Di luar upah layak minimum ini, AJI meminta agar perusahaan media menerapkan sistem kenaikan upah reguler dengan memperhitungkan angka inflasi, prestasi kerja, jabatan dan masa kerja setiap jurnalis. "Selain itu kami juga meminta perusahaan media memberikan sejumlah jaminan, seperti asuransi keselamatan kerja, jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial bagi keluarganya," kata Winuranto Adhi, Koordinator Divisi Serikat Pekerja AJI Indonesia.

Berbanding terbalik dengan tuntutan upah layak, survei AJI di berbagai kota tersebut masih menemukan fakta yang sangat memprihatinkan. Ditemukan, masih ada media yang menggaji jurnalisnya di bawah angka UMK. Di Palu, misalnya, jurnalis di harian Media Alkhairaat dan mingguan Deadlinenews cuma mendapatkan gaji pokok Rp 500 ribu. Di Medan, Sumatera Utara, jurnalis radio City FM dan Star News, juga hanya memperoleh upah Rp 500 ribu-Rp 700 ribu, bahkan ada yang diupah berdasarkan hitungan berita.

Reporter Semarang TV, di Semarang Jawa Tengah juga bernasib sama, hanya bergaji Rp 700 ribu, tanpa mendapatkan tunjangan transportasi dan komunikasi. Sementara di Kediri Jawa Timur, KSTV memberikan upah jurnalis pada masa percobaan sebesar Rp 300 ribu dan setelah diangkat sebagai karyawan, hanya bertambah menjadi Rp 500 ribu. Di Dhoho TV, upah reporter berkisar Rp 400 ribu. Lalu, harian Memorandum memberi upah wartawan pada masa percobaan sebesar Rp 350 ribu dan saat diangkat menjadi karyawan hanya terdongkrak menjadi Rp 450 ribu. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, harian Kota Kursor memberi upah Rp 650 ribu per bulan—di bawah nilai UMP NTT sebesar Rp 850 ribu. Di Papua, AJI malah menemukan ada wartawan yang bekerja tanpa mengetahui jika dirinya mempunyai hak cuti.

AJI memberikan apresiasi kepada media yang memberikan upah melebihi standar upah layak kepada jurnalisnya yang baru diangkat menjadi karyawan tetap, seperti harian Bisnis Indonesia (Rp 5 juta), The Jakarta Post (Rp 5,5 juta), dan Jakarta Globe (Rp 5,5 juta).

Perbandingan Upah Layak Versi AJI dan Upah Minimum Kota (UMK):

No.	Kota	Upah Layak AJI	UMK/UMP
1.	Jakarta	Rp 4.748.919	Rp 1.290.000
2.	Kediri	Rp 2.836.557	Rp 973.950
3.	Kendari	Rp 2.972.000	Rp 970.000
4.	Kupang	Rp 3.929.228	Rp 850.000
5.	Surabaya	Rp 3.864.850	Rp 1.115.000
6.	Denpasar	Rp 3.894.583	Rp 1.191.500

7.	Lampung	Rp 2.568.462	Rp 865.000
8.	Medan	Rp 3.816.120	Rp 1.197.000
9.	Yogyakarta	Rp 3.147.980	Rp 808.000
10.	Makassar	Rp 4.037.226	Rp 1.100.000
11.	Pontianak	Rp 3.526.600	Rp 895.000
12.	Batam	Rp 4.243.030	Rp 1.180.000
13.	Palu	Rp 2.150.066	Rp 827.500
14.	Semarang	Rp 3.240.081	Rp 961.323
15.	Pekanbaru	Rp 3.604.700	Rp 1.135.000
16.	Jayapura	Rp 6.414.320	Rp 1.316.500

III.4 Teknik Pengumpulan Data

- 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu pengumpulan data secara langsung dengan cara observasi dan wawancara dengan informan. Untuk menghindari ketidakvalidan data, peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada narasumber maupun para ahli guna mendapatkan data yang sebenarnya dan sesuai dengan tujuan penelitian.
- 2) Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun data dari buku-buku serta bacaan yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil data dari sumber-sumber bacaan guna mengambil teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli sebagai bahan rujukan.

III.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang merupakan pengukuran dengan menggunakan data nominal yang menyangkut klasifikasi atau kategorisasi sejumlah variabel ke dalam beberapa subkelas nominal. Melalui pendekatan deduktif, data yang diperoleh dari lapangan diambil kesimpulan dari yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum. Singkatnya data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu telah dikumpulkan dengan berbagai macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan diproses sebelum digunakan, yang kemudian dianalisis untuk memperoleh hasil penelitian.

Melalui teknik analisis kualitatif kita dapat mengenal orang (subjek) secara pribadi dan melihat mereka mengembangkan definisi mereka sendiri tentang dunia ini. Kita dapat merasakan apa yang mereka alami dalam pergaulan dengan masyarakat mereka sehari-hari. Metode kualitatif memungkinkan kita menyelidiki konsep-konsep yang dalam pendekatan penelitian lainnya, intinya akan hilang. Konsep-konsep seperti keindahan, rasa sakit, keimanan, penderitaan, frustrasi, harapan dan kasih sayang, dapat diselidiki sebagaimana orang-orang sesungguhnya dalam kehidupan mereka sehari-hari (Bogdan, 1992: 5).

Metode penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip langka atau metode statistik. Pembicaraan yang sebenarnya, isyarat, dan tindakan sosial lainnya adalah bahan mental untuk analisis kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, pengamatan berperan serta, wawancara mendalam dan analisis dokumen juga dikenal, tetapi tidak dianggap terlalu penting, sementara dalam penelitian kualitatif ketiga metode tersebut bersifat fundamental dan sering digunakan bersama-sama, seperti dalam studi kasus. Jelasnya penelitian kualitatif bertujuan memperoleh pemahaman yang otentik mengenai pengalaman orang-orang, sebagaimana dirasakan oleh orang-orang bersangkutan. Oleh karena itu, salah satu ciri penelitian kualitatif adalah bahwa tidak ada hipotesis yang spesifik pada saat penelitian dimulai; hipotesis justru dibangun selama tahap-tahap penelitian, setelah di uji atau dikonfrontasikan dengan data yang diperoleh penelitian selama penelitian tersebut (Mulyana, 2001: 150).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti sejak bulan Maret hingga Juli 2011, dengan melakukan wawancara mendalam pada wartawan anggota AJI cabang Medan yang masih aktif. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa orang responden penelitian berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Selain responden tadi, peneliti juga mengumpulkan informasi dari beberapa informan yang dapat mendukung penelitian ini, antara lain pengurus AJI Indonesia, Ketua Komite Etik AJI Medan, serta seorang wartawan di luar anggota AJI yang banyak mengetahui gerak-gerik anggota AJI Medan di lapangan.

Penelitian (wawancara) dilakukan di berbagai tempat, mulai dari kantor media tempat informan bekerja, instansi pemerintah, hingga kantin dan warung kopi. Keseluruhan pemilihan lokasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh responden dan informan agar yang bersangkutan dapat merasa nyaman dan secara terbuka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti.

IV.1 Hasil Pengamatan dan Wawancara

Peneliti menentukan anggota AJI Medan yang masih aktif sebagai responden. Pelaksanaan pengumpulan data menggunakan cara observasi dan wawancara mendalam. Penelitian ini berlangsung dari Maret sampai Juli 2011.

Peneliti awalnya menemui Ketua AJI Medan, Rika Suartiningsih, untuk meminta izin akan melakukan penelitian di tubuh organisasi yang dipimpinnya. Pertemuan berlangsung di ruang redaksi radio Kiss FM, kantornya pada 1 Maret 2011. Setelah mendapat izin, peneliti kemudian menghubungi Sekretaris Jendral AJI Medan, Jalaludin Ibrahim, untuk meminta data anggota AJI Medan. Kami akhirnya bertemu di kantornya, radio Smart FM pada 5 Mei 2011. Ia kemudian memberikan data anggota AJI, Kode Etik AJI, serta AD/ART AJI yang belum selesai. AD/ART tersebut baru selesai pada anggaran dasar, sementara anggaran rumah tangga hanya sampai BAB II. Ia belum sempat merampungkan data itu setelah sebelumnya hilang terkena virus di komputer jinjingnya.

Total 50 orang anggota AJI yang terdaftar di dalam data anggota. Namun tak semuanya masih aktif. Lima orang di antaranya terlihat diberi label merah, menandakan yang bersangkutan sudah tak aktif lagi. Sementara 45 orang lainnya juga tak seluruhnya berstatus wartawan aktif. Beberapa sudah menjadi pimpinan media, ada pula yang sudah beralih profesi. Sementara beberapa yang lain, ada yang menjadi wartawan lepas dan *film maker*. Peneliti kemudian memilih anggota yang masih berstatus reporter karena kemungkinan besar sering berada di lapangan.

Peneliti menggunakan teknik *snowball* untuk menentukan responden penelitian, yakni dari satu orang responden kemudian berkembang ke responden lain berdasarkan informasi yang diberikannya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan responden yang

benar-benar sesuai dengan keinginan peneliti. Apalagi ternyata dari informasi yang diberikan responden, terdapat beberapa anggota yang hanya sekadar nama di kartu anggota alias sama sekali tak pernah aktif lagi dalam kegiatan AJI Medan.

Menemui para responden juga terbilang tak mudah. Profesi wartawan yang tak banyak memiliki waktu luang, membuat proses wawancara kerap tertunda. Sementara peneliti juga tak ingin proses wawancara berlangsung tak nyaman dan dibatasi waktu. Sehingga proses wawancara kemudian terjadi diantara waktu senggang mereka.

Dua orang anggota AJI yang peneliti rencanakan menjadi responden, ternyata tak bersedia untuk menjadi responden penelitian ini. Seorang wanita tak bersedia dengan alasan kesibukannya dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini. Ia langsung menyatakan tak bersedia dan menyarankan untuk menghubungi anggota lain. Sementara yang seorang lagi menyatakan tak bersedia karena dampak buruk yang ia khawatirkan terhadap karirnya jika menjadi salah satu responden. Pria ini mengaku mengkhawatirkan karir karena harus menafkahi keluarganya. Akhirnya empat orang responden ini peneliti rasa cukup karena terdapat kesamaan dari informasi yang diberikan.

Peneliti juga menggali informasi dari beberapa informan yang terkait dengan penelitian. Mereka memberikan data maupun penjelasan terhadap aturan-aturan yang menjadi acuan, sehingga dapat membantu peneliti untuk merumuskan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Antara lain Koordinator Divisi Pekerja AJI Pusat, yang peneliti temui saat berkunjung ke Jakarta, serta Ketua Komite Etik AJI Medan.

Identitas responden dalam penelitian ini akan dirahasiakan, meskipun beberapa responden menyatakan kesediaan jika identitasnya dibuat secara terbuka. Namun dengan alasan ingin melindungi para responden dan agar membuat mereka nyaman berbicara

secara terbuka, akhirnya seluruh identitas disamarkan. Nama-nama mereka diganti dengan nama samaran, sehingga nama yang dibuat bukan nama yang sebenarnya.

IV.1.1 Hasil Wawancara

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap empat orang responden. Seluruhnya menggunakan alat perekam, yang telah disetujui oleh responden.

Responden 1

Reza (Nama Samaran)

Wawancara berlangsung di sebuah ruangan kerja pada sebuah kantor media, tempat informan sehari-hari bekerja. Sebenarnya peneliti merasa kurang nyaman dengan pemilihan tempat tersebut yang dikhawatirkan dapat membatasi jawaban-jawaban yang diberikan informan. Namun informan menepis anggapan itu dan menyatakan siap berbicara terbuka. Maka pada sebuah sore yang dingin, dengan hujan lebat menyertai, wawancara pun dimulai.

Reza menjadi wartawan sejak 2003. Ia memilih profesi itu karena tak ada perusahaan yang mau menerima sesuai dengan ilmu sarjananya. Sembari menjadi wartawan, ia juga bekerja di bursa saham sebagai broker. Ia mendapat gaji Rp 4 juta sebulan dari pekerjaan itu. Profesi sebagai wartawan dianggapnya hanya menjadi pelampiasan dari hobi menulisnya, sedangkan mata pencahariannya berasal dari bursa saham. Ia kemudian menceritakan strateginya membagi waktu ketika itu. Saat pukul

12.00 ketika jeda pasar saham, Reza liputan. Pukul 13.30, ia balik lagi ke bursa saham di Capital Building. Begitu pasar saham tutup pukul 15.00, ia kembali liputan. Setelah itu balik ke kantor media tempat ia bekerja, sekitar pukul 21.00 Reza pulang ke rumah. Itu ia jalani selama 2003 hingga 2005.

Reza kemudian memilih bergabung dengan AJI karena punya konsep dan prinsip tentang perjuangan terhadap nasib jurnalis. AJI dianggapnya tempat yang tepat untuk sama-sama memperjuangkan kesejahteraan jurnalis, terutama persoalan gaji. Berjuang bersama ia yakin lebih baik daripada berteriak-teriak sendiri.

Terdaftar sebagai anggota AJI sejak 2005, Reza mengaku selalu aktif dan terlibat sebagai pengurus. Berbagai kegiatan telah ia ikuti sebagai anggota AJI, khususnya kampanye upah layak untuk seorang jurnalis.

Keinginannya untuk memperjuangkan nasib jurnalis sendiri sudah muncul sejak 2003, saat pertama kali bekerja sebagai reporter di sebuah media cetak. Ia mendapat gaji Rp 350.000. Saat itu ia heran, wartawan-wartawan senior di atasnya bergaji lebih rendah tapi bisa memiliki mobil, ia bingung dari mana mereka mendapatkan uang. Kemudian setelah beberapa waktu, barulah ia tahu jika mereka itu menerima uang dalam kasus pemberitaan. Reza merasa perilaku itu tidak benar namun tak bisa berbuat apa-apa dengan gaji kecil yang diterima.

Sikap independen menurutnya tanpa terpengaruh apa pun dalam pembuatan berita. Jadi siapa pun tidak bisa memengaruhi wartawan itu, termasuk pemimpin redaksi maupun pemilik media sendiri. Jadi kalau sudah memenuhi kaedah-kaedah jurnalistik, wajib diberitakan. Tanpa ada intervensi dari siapa pun. Sikap ini sendiri bagi Reza masih belum diterapkan oleh sebagian besar wartawan di Medan. Gaji yang kecil menurutnya

berpengaruh besar atas kondisi ini. Hasil pengamatannya, sekitar 50% media di Sumatera Utara ini masih mengutamakan kepentingan perusahaan, bukan independensi terhadap pemberitaan.

Ia kemudian memberi contoh kasus Harian Orbit yang diserang sekelompok orang, diduga karena pemberitaannya terkait perjudian. Berita yang diturunkan itu menurutnya tidak memenuhi unsur *cover both side*, sehingga tidak sesuai dengan kaedah-kaedah jurnalistik. Hal itu dikarenakan adanya kepentingan dalam pemberitaan. Ia menyebut ada *bargaining* uang dalam kasus itu. “Supaya ini berita tidak dinaikkan, ya hajar dulu, ‘dibantai’ istilah medianya. Dibantai dulu dalam pemberitaan baru nanti ada damai. Ini yang banyak terjadi di media-media kita,” katanya.

Selain itu wartawan juga sering menerima berita titipan. Ia memberi contoh lain. Seorang anggota DPRD meminta seorang wartawan untuk memuat komentarnya tentang posisi Gatot Pudjo Nugroho sebagai gubernur. Padahal menurut Reza, kriteria pantas atau tidak pantas bukanlah kita yang menentukan tetapi pemerintah sesuai UU soal otonomi daerah. Tapi karena uang yang diberikan anggota dewan tadi, akhirnya dibuatlah berita itu dan masyarakat juga yang menjadi korban. Situasi ini kemudian menjadi sangat berbahaya karena biasanya justru dilakukan oleh media-media dengan oplah besar di Sumatera Utara.

Sejak tahun 2005 Reza pindah ke media yang lebih mapan, milik jaringan media nasional. Hingga kini ia bekerja di media itu. Reza mendapat berbagai kompensasi sebagai wartawan. Ada asuransi untuk dirinya dan anak istri, dengan tanggungan anak satu orang. Ia juga mendapat jatah pulsa telepon Rp 250 ribu tiap bulan. Untuk jaminan

hari tua, ia terdaftar dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Selain itu ia juga mendapat tunjangan transportasi dan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar dua bulan gaji. Beberapa fasilitas juga bisa ia gunakan, telepon genggam, *tape recorder*. Bentuknya inventaris perusahaan, jadi selama kerja di perusahaan itu barang-barang itu menjadi miliknya. Ada juga dua mobil, kapan saja ia butuh untuk liputan jauh, mobil sudah siap. Menurutnya apa yang diberikan perusahaan tersebut sudah sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Namun ia enggan menyebutkan nominal gaji pokok yang ia terima. Setelah didesak, ia hanya memberi bocoran besarnya, yang pasti di atas Rp 1,2 juta.

Keseluruhan kompensasi yang diterimanya ini dianggap Reza telah mencukupi untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarganya. Saat ini istrinya sedang kuliah di salah satu jurusan kedokteran di salah satu universitas di Sumatera. Istri Reza tinggal bersama anak semata wayang mereka yang masih berusia tiga tahun di kota tempat kampus tersebut, mereka menyewa rumah. Setiap enam bulan sekali ibu dan anak itu pulang ke Medan, dengan menggunakan transportasi udara pulang-pergi. Sang istri juga kerap pulang-pergi ke Jakarta dengan pesawat untuk kepentingan *co-ass*. Seluruh biaya kuliah, transportasi serta biaya hidup mereka ditanggung Reza, kebetulan istrinya tak punya pekerjaan. Reza menyatakan pendapatannya mencukupi untuk membiayai itu semua.

Selama kurun waktu delapan tahun menjadi wartawan, Reza mengakui pernah menikmati manisnya pemberian narasumber, alias amplop. Namun menurutnya itu sudah lama, antara tahun 2003 hingga 2005. Tepatnya sebelum ia masuk AJI. Alasannya? Karena ia masih bergaji Rp 350 ribu perbulan. Padahal saat itu ia juga memiliki penghasilan lain di bursa saham dengan pendapatan Rp 4 juta sebulan. Namun Reza

enggan mengaitkan penghasilan lain itu. Menurutnya ketika ia bekerja sebagai jurnalis, maka ia seorang jurnalis. Begitu juga saat ia berperan sebagai broker. Ia kemudian menyebut saat dulu menerima amplop juga disebabkan ikut-ikutan dengan teman. Ia mengaku menerima uang itu karena tak ingin temannya tersinggung. Tapi jika ada kalimat intervensi yang mengganggu berita yang akan ditulisnya, ia tak mau menerima.

Uang yang kerap diterimanya ketika itu jauh melampaui gajinya sebagai wartawan. Sebagian besar uang yang diterimanya berada di atas Rp 500 ribu. Paling sedikit Rp 500 ribu. “Untuk jajan-jajan, untuk jalan-jalan, *gak* di bawa ke rumah. Jadi mana yang halal, mana yang sedikit halal, itu harus dibedakan (tertawa). Gajiku biasa ditransfer dari rekening, ATM itu sama istriku. Eh, ini cerita 2003 ya? Oh *gak*, semua dicampur aduk di situ.”

Ia seolah terceplos menyebutkan kalimat itu. Ketika peneliti berusaha mendalami dengan menanyakan kemungkinan ia pernah terima amplop setelah tahun 2005, Reza kemudian enggan menjawab.

Media tempatnya kini bekerja melarang para wartawannya untuk menerima amplop. Bertolak belakang dengan media tempat ia bekerja sebelumnya. Ia bercerita, di media sebelumnya ia malah pernah disuruh untuk mengambil uang dari sumber berita. Ketika itu ia mendapat perintah dari redaktornya mengambil uang dari Kanit Junisila Pengadilan Negeri. Uang sebesar Rp 5 juta kemudian singgah di tangannya untuk kemudian seluruhnya diserahkan pada redaktur koran itu.

Menerima amplop atau pemberian dari narasumber menurut Reza tak memengaruhi apa-apa baginya. Ia biasa memilah pemberian-pemberian itu. Jika ada pesanan untuk mengaburkan fakta di balik sebuah pemberian, ia memilih untuk tidak menerima. Tapi jika dianggapnya itu tidak memengaruhi berita, misalnya ketika ada konferensi pers, ia akan ambil. Reza mengungkapkan, ia bisa bersikap seperti itu karena sudah memiliki penghasilan lain, jadi karena ia memang sudah punya uang. Kalau ia hanya mengandalkan pendapatan sebagai wartawan dengan gaji Rp 350 ribu ketika itu, ia pun tak yakin sanggup menolak. Reza kemudian mengambil kesimpulan, seseorang akan berpikiran positif dengan pekerjaannya, jika gaji yang ia terima sudah cukup. Reza lalu mempertanyakan, apakah semua wartawan bisa seperti itu? Dia bisa bersikap demikian karena sudah memiliki uang tabungan. Itulah sebabnya ia tak pernah percaya dengan media-media besar di Medan, karena ia sudah tahu bagaimana berita tersebut dikonstruksi di lapangan.

Selain dalam bentuk uang, pemberian dalam bentuk lain kerap ia terima. Seperti voucher mengisi BBM Pertamina dari Pertamina atau souvenir produk seperti Kratingdaeng dan Coca-Cola. Sekali lagi ia menegaskan jika itu hanya dilakukan antara rentang waktu 2003-2005 dan tak mempengaruhi berita yang ia buat. Sehingga ia pun tak pernah mendapat komplain dari narasumber yang telah memberikan amplop, karena sesuai fakta dan *cover both side*. Hubungan emosional secara pribadi juga tetap tak terganggu.

Meski saat ini mengaku tak lagi menerima amplop, namun Reza tetap menerima jika pemberian itu diberikan narasumber dalam konteks hubungan pribadi. Misalnya

ketika gubernur memberikan dalam rangka menjelang Lebaran, tetapi atas nama pribadi dan Reza pun berperan sebagai pribadinya, tidak sebagai wartawan, ia akan terima.

Pemberian dalam bentuk pribadi menurutnya tak masalah jika diterima karena tidak ada sangkut pautnya dengan jurnalistik. Selama ini ia selalu membedakan yang mana dalam konteks pekerjaan dan mana yang tidak. Ia beralasan salah satu tujuannya untuk menjaga hubungan baik dengan narasumber.

Ia juga kini tetap menerima pemberian dalam bentuk souvenir. Dibayari makan oleh narasumber juga ia terima. Meski ia berusaha untuk tetap menjaga integritasnya saat bertemu sendiri dengan narasumber. Tetapi jika sudah ramai dengan wartawan lain, ia pun tak kuasa melarang wartawan lain untuk menerima, sebab belum tentu gaji mereka sesuai dengan standar gaji yang ia peroleh. Reza juga mengaku berbeda dengan anak AJI lain, yang disebutkan secara terbuka memperingatkan wartawan lain untuk tidak mengambil uang. Itulah sebabnya anggota AJI kerap dimusuhi oleh teman-teman media karena dianggap mengganggu rezeki mereka. Reza merasa tak pantas melarang karena belum tentu gaji mereka cukup. Ia mengandaikan, ketika ia melarang, ternyata wartawan tersebut membutuhkan uang untuk membeli susu anaknya di rumah, atau seorang wartawan yang memiliki empat orang anak hanya bergaji pada kisaran ratusan ribu. Bagaimana mau makan anak-anaknya? Belum lagi biaya sekolah mereka. Reza mengaku akan merasa berdosa jika melakukan tindakan itu.

Untuk menghindari amplop, Reza biasanya langsung meninggalkan tempat begitu kegiatan atau konferensi pers selesai. Sehingga ia juga tak akan diributkan wartawan lain yang mungkin mengharapkan sekali pemberian itu. Pada prinsipnya, Reza tak ingin

mengganggu mereka yang mencari uang, tetapi mengganggu perusahaan mereka yang menggaji wartawannya kecil.

Mengapa ia tak lagi menerima amplop sejak 2005? Gaji yang lebih baik menjadi alasan utama. Menurutnya ketika seorang wartawan sudah mendapat gaji yang cukup, orientasinya tidak lagi mencari uang tetapi mencari berita yang benar-benar layak bagi media tempatnya bekerja.

Reza kini juga memiliki pendapatan lain di luar profesinya sebagai wartawan. Dia menjadi *personal project* anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Ia menyebutnya, semacam juru bicara bayangan. Seluruh anggota DPR asal partai itu jika berkunjung ke Medan, akan ditangani oleh Reza perihal hubungan dengan media.

Awalnya ia mengaku kadangkala juga membuat *press release* untuk dibagikan kepada para wartawan. Namun ketika disinggung independensi dia sebagai wartawan, ia membantah pernah membuat. Ada orang lain yang bertugas membuat itu, katanya. Reza menceritakan, tugas utamanya menghubungkan mereka dengan media. Akses yang dimilikinya sebagai seorang jurnalis menjadi sebab ia diangkat oleh partai politik penguasa itu. Ia mengondisikan suasana di tempat yang akan dikunjungi agar publik tahu kedatangan anggota dewan tersebut dan mengetahui apa yang mereka perbuat di sana. Tugasnya seperti seorang humas tapi tidak muncul di permukaan. Ada orang lain lagi yang mengerjakan itu di permukaan. Setiap bulan ia mendapat gaji rutin untuk itu.

Termasuk membagi amplop kepada wartawan? Reza mengaku tak pernah tahu soal itu. Biasanya yang ia tahu, tak ada amplop yang dibagikan saat kegiatan yang

melibatkan anggota DPR, karena mereka sumber berita yang layak, sebagai pengambil keputusan.

Reza membantah jika ia disebut terlibat dalam dunia politik. Ia bukan bekerja pada partai tersebut tetapi bekerja dengan orang-orangnya. Seluruh anggota DPR asal partai itu setiap bulan gajinya dipotong untuk membiayai staf-staf ahli di daerah, termasuk Reza. Ia menjadi salah satu staf itu. Reza tak mau terbuka soal nominal uang yang dia dapatkan dari pekerjaan ini, ia hanya menyebutkan besarnya tiga sampai empat kali lipat dari Upah Minimum Provinsi (UMP) (UMP Sumut tahun 2011). Ada kunjungan atau tidak, ia tetap mendapat gaji setiap bulan.

Pendapatannya dari pekerjaan ini jauh lebih besar dari gajinya sebagai wartawan. Itulah sebabnya ia mampu membiayai seluruh pengeluaran keluarganya yang terbilang cukup besar. Reza tak menganggap pekerjaan ini mengganggu independensinya. Media tempatnya bekerja juga tak melarang. Ia mengaku tak segan menulis perbuatan negatif atau hal buruk yang dilakukan orang-orang yang menggaji tersebut. Cara ini menurutnya adalah salah satu usaha untuk tetap hidup layak dengan tetap menjaga independensi sebagai wartawan. Baginya, tidak akan bisa kaya jika hanya menjadi wartawan.

AJI kerap mengampanyekan anti amplop. Tapi Reza tak sepakat. Hal inilah yang menurutnya membuat anggota AJI yang lain kesal terhadapnya. Ia berpendapat, kampanye anti amplop tak layak dilakukan dengan kondisi kesejahteraan yang memprihatinkan seperti ini. Sebab itu, ia lebih sepakat dengan kampanye upah layak.

Selama ini AJI menurutnya cukup tegas menindak anggotanya yang terbukti menerima amplop. Biasanya akan diberi teguran keras terlebih dahulu, lalu jika terbukti melakukan lagi akan dipecat, itu harga mati. Beberapa waktu lalu pernah ada anggota AJI Medan yang mengundurkan diri karena belum siap untuk tidak menerima amplop. Ia lupa kapan persisnya, tapi antara kurun waktu 2005-2010.

Sesama anggota AJI juga kerap saling mengingatkan, bukan mengawasi. Hingga saat ini yang ia tahu belum pernah ada yang mengadukan perbuatan temannya, karena anggota AJI juga gajinya belum tentu besar.

Menyikapi kondisi saat ini, menurut Reza setiap wartawan harus memiliki usaha atau pekerjaan lain. Sebab profesi jurnalis tidak bisa menjadi penopang hidup sampai tua. Ia kemudian mengutip pernyataan wartawan senior, almarhum Rosihan Anwar, yang mengatakan 'kita tak akan bisa kaya menjadi wartawan.' Meski begitu, hingga kini belum terbersit di pikirannya untuk meninggalkan profesi ini. Ia merasa masih akan mencukupi, apalagi ia mendapat jaminan hari tua dari Jamsostek dan dana pensiun dari perusahaan media tempatnya bekerja saat ini.

Responden 2

Doni (Nama Samaran)

Doni tak tinggal di Medan. Peneliti sebenarnya tidak menempatkan namanya sebagai prioritas mengingat ia jarang berkunjung ke Medan. Namun tanpa diduga ia

mengabarkan pada peneliti jika sedang berada di Medan dan memiliki waktu untuk bertemu. Ia memang terlihat paling antusias dibanding para responden lain. Maka tanpa pikir panjang, peneliti langsung bergegas menemuinya di tempat yang telah ia tentukan. Sebuah tempat jajanan di kawasan Amaliun.

Doni mulai terjun ke dunia jurnalistik sejak Januari 2007. Pekerjaan ini sesuai dengan latar belakang pendidikannya yang telah ia selesaikan Desember 2006. Doni memang hobi menulis. Ia selalu terobsesi untuk membuat hal-hal yang menarik dalam bentuk tulisan. Atas dasar itu, ia menekuni pekerjaan sebagai wartawan.

Sebagai seorang wartawan, ia merasa terpanggil untuk membantu perjuangan upah layak jurnalis. Atas ajakan temannya, sejak dua tahun terakhir Doni resmi menjadi anggota AJI. Berbagai kegiatan telah ia ikuti bersama organisasi ini, terakhir yang ia tahu, AJI Medan menyelenggarakan program beasiswa liputan mengenai keterbukaan informasi publik.

Independensi bagi Doni, berarti berpihak kepada yang benar. Tetapi kebenaran itu bukan kebenaran siapa yang salah atau siapa yang benar, melainkan dalam konteks seseorang yang mengatakan sesuatu. Jadi dalam konsepnya mengenai independen, ia tidak menjadi pemutus sesuatu tetapi cukup menjadi penyampai sesuatu. Wartawan tidak boleh membuat kesimpulan.

Ada dua poin penting dari independensi menurut Doni. Yang pertama bagaimana seorang wartawan menempatkan posisinya dalam sebuah pemberitaan. Sedangkan yang kedua, berpihak pada masyarakat. Apa pun masalahnya, Doni berpandangan yang salah

itu tetap pemerintah, polisi atau tentara. Birokrasi. Masyarakat tak mungkin salah. Sebab pemerintah-lah yang membuat keputusan. Jadi ketika sebuah kasus misalnya, berhadapan dengan masyarakat, ia akan berpihak pada masyarakat, masyarakat yang lemah.

Kebiasaan suka menyimpulkan sesuatu di kalangan wartawan, menurutnya kerap mengesankan wartawan tersebut tidak independen. Misalnya, disebutkan 300 dari 500 orang penduduk di Sumatera Utara ini miskin, lalu ditulislah Sumatera Utara ini miskin. Padahal itu hanya opini si wartawan. Persoalan menulis inilah yang sering membentuk kesan itu.

Indikasi seorang wartawan tidak independen, menurutnya dapat dilihat dari posisi mana dia memandang suatu persoalan. Misalnya ada penggusuran pedagang kaki lima. Wartawan biasanya akan lebih nyaman datang dengan rombongan walikota ketimbang harus menunggu di lokasi pedagang kaki lima tersebut. Dengan posisi itu, kata Doni, walaupun awalnya memang berniat independen tetapi kemudian kaca matanya akan berbeda, yang dia lihat masyarakat itu salah, karena dia menggunakan kacamata birokrasi.

Doni kemudian memberikan contoh lain, yang pernah ia alami langsung. Ini kasus penggusuran kompleks Bata oleh TNI tahun 2009 di Jl Putri Hijau. Ia menceritakan, satu hari sebelum penggusuran pihak Kodam mengadakan konferensi pers di Kapendam, Jl Listrik. Ada instruksi agar tidak ditulis penggusuran melainkan penertiban. Jadi ada pengarahan. Ia menyebut situasi ketika itu lebih pantas disebut pengkondisian daripada konferensi pers. Padahal ketika hari-H, aksi yang dilakukan lebih mirip penggusuran, tapi kemudian beberapa media menggunakan kata penertiban. Doni menduga amplop yang

diterima para wartawan ketika konferensi pers menjadi penyebab utama, selain ada rasa takut menghadapi kekuasaan. Ia mengaku tak tahu berapa uang yang dibagi, ketika itu ia langsung pulang. Doni hanya bisa memastikan ada amplop yang dibagikan.

Hingga kini Doni telah tiga kali pindah media. Dua media sebelumnya merupakan jaringan media nasional. Ia memutuskan keluar karena sebuah alasan terkait pemberitaan. Doni kemudian memilih untuk kembali ke kampung halaman bersama istrinya. Ia pun bekerja pada media yang memungkinkan baginya untuk tinggal di daerah itu.

Sebagai wartawan yang tidak berada di kota besar, Doni menerima gaji jauh lebih kecil dari media tempat ia bekerja sebelumnya. Gaji pokok yang ia terima perbulan hanya berjumlah Rp 500 ribu. Tak ada fasilitas atau kompensasi lain. Menurutnyanya itu masih mending, karena mungkin hanya dia yang mendapat kompensasi. Wartawan lain di daerah dari media yang sama, tak pernah mendapatkan kompensasi apa pun. Hanya dibekali kartu pers!

Pada dua media sebelumnya, ia menerima gaji di atas UMR. Selain tetap mendapatkan berbagai tunjangan dan fasilitas. Tunjangan prestasi paling ia senangi. Salah satu bentuk kompensasi ini dapat memacu semangat kerjanya untuk mencari uang dengan prestasi, ia rela bekerja keras menghasilkan prestasi demi mendapat uang tambahan.

Untuk menghidupi keluarganya, Doni memiliki berbagai pendapatan lain. Ia mengajar bahasa Indonesia di almamaternya, sebuah perguruan milik keluarga besarnya. Selain itu ia juga berternak ikan. Jumlah ternaknya kini mencapai empat ribu ekor. Setiap

panen ia mendapat sekitar Rp 8 juta. Tiap tiga bulan sekali ikan-ikan tersebut bisa dipanen. Sementara dari mengajar, ia mendapat bayaran Rp 1,5 juta sebulan. Dua pendapatan ini jelas jauh melampaui pendapatannya sebagai wartawan. Sementara sang istri mendapat gaji Rp 2,1 juta perbulan dari pekerjaannya sebagai pegawai.

Total pengeluaran Doni selama satu bulan sekitar Rp 3 juta. Setengah dari nominal itu justru dihabiskan untuk operasional liputan. Kalau mau hitung-hitungan, ia bisa dibilang rugi Rp 1 juta tiap bulan untuk proses liputan. Kondisi geografis yang jauh antar kabupaten menyebabkan biaya operasionalnya membengkak. Meskipun tak dikenai target berita perhari dari medianya, ia sudah terbiasa dengan iklim liputan di Medan yang harus aktif mengejar target berita. Tak heran kini sebagian besar waktunya tetap dihabiskan memburu berita, apalagi waktu untuk mengajar tak sampai setengah hari.

Doni mengaku pernah menerima amplop. Dulu, katanya. Saat itu masa-masa awal ia menjadi wartawan. Ia tak kuasa menolak pemberian itu karena ada kerja sama iklan antara sumber berita dengan perusahaan medianya. Ia pun mengembalikan amplop itu di kantor. Selanjutnya hingga kini, ia merasa sama sekali tak pernah menerima.

Menghindari amplop biasanya ia lakukan dengan meninggalkan lokasi sebelum acara berakhir, karena usai acara ditutup biasanya akan dibagikan sesuatu, entah amplop atau barang-barang pemberian lain. Ia juga tak mau menandatangani apa pun yang disodorkan. Biasanya saat kegiatan-kegiatan pemerintah selalu ada absensi. Fungsinya untuk mendata wartawan yang hadir dan akan disiapkan amplopnya. Sebisa mungkin ia tidak menandatangani absen itu.

Selama ini menurutnya tak ada masalah. Rasa dilema muncul ketika bersama wartawan lain melakukan wawancara dan setelah itu diberi uang dari narasumber. Terkadang ia tak enak menolak sebab kemungkinan temannya itu memang sedang membutuhkan uang. Biasanya Doni akan mengambil uang itu dan langsung mengembalikan saat sudah keluar dari lokasi. Ia akan mencari alasan untuk masuk kembali menemui narasumber. Cara itu tentu berdampak. Hubungannya dengan narasumber itu menjadi kurang akrab, semacam ada celah, katanya. Sebab, yang sering menjadi modus, cerita Doni, nilai-nilai budaya ketimuran yang terbiasa memberikan oleh-oleh atau hadiah. Jadi kalau tidak mau menerima, akan dianggap tak sopan dan tak mau berteman.

Akibat sikapnya itu, Doni acapkali kehilangan berita. Teman-temannya tak membagi informasi atau sengaja membatasinya. Ia juga sering dianggap sombong dan sok paten. Apalagi saat ini ia bekerja di daerah, yang menurutnya jauh lebih parah lagi. Ia menggunakan kata 'luar biasa' untuk menggambarkan kondisinya. Akhirnya, untuk menghadapi itu ia terbiasa bermain tunggal alias bergerak sendiri saat liputan. Sementara saat kumpul, ia tetap ikut gabung, berusaha terus menjalin komunikasi. Doni pun tak pernah memberi tahu mereka jika ia tak mau menerima uang, dalam pergaulan ia seolah-olah ikut menjadi bagian dari mereka.

Doni mau menerima jika sumber berita memberikan souvenir. Ia memilih untuk mengambil barang itu, walaupun sebagian pihak menyatakan wartawan juga tak boleh menerima souvenir. Misalnya, perusahaan Unilever memberikan shampo. Menurutnya bisa jadi produk itu diberikan agar wartawan dapat merasakan langsung bagus atau

tidaknya, sehingga bisa langsung menuliskan pengalaman menggunakannya. Ia merasa souvenir seperti itu tidak terlalu mahal, kalau souvenir-nya mobil, baru perlu dipertanyakan. Dalam bentuk lain seperti voucher juga pernah ia terima. Ketika itu voucher makan pisang goreng pada salah satu gerai di Millennium Plaza. Ia mendapat voucher itu saat liputan kegiatan partai politik. Ingin mencoba, ia pun mengambil voucher itu.

Selain itu, meminta fasilitas dari narasumber juga beberapa kali ia lakukan. Misalnya ada tempat karaoke yang baru buka, Doni ingin masuk ke sana. Karena uangnya tak mencukupi, ia mengajak pejabat untuk bersama masuk ke sana. Akhirnya bersama wartawan lain, mereka menghibur diri di sana. Ia mengelak jika itu disebut meminta.

Doni menyatakan, pemberian uang dari narasumber apa pun bentuknya tak layak untuk diterima. Termasuk atas nama pribadi. Sebab kalau orang itu mengenal Doni sebagai wartawan, tetap termasuk dalam kategori amplop. Meskipun begitu, ia juga pernah beberapa kali menerima uang dengan cara seperti itu. Saat akan menikah, beberapa pejabat yang kerap menjadi narasumber memberikan uang padanya saat Doni memberikan undangan. Pada lain kesempatan, ia juga pernah menerima 'hadiah' itu saat istrinya melahirkan. Wakil Gubernur Sumatera Utara ketika itu, Gatot Pudjo Nugroho datang berkunjung dan memberikan uang sebesar Rp 1 juta.

Ia menyadari pemberian-pemberian semacam itu tidak wajar karena pasti melihat latar belakangnya sebagai wartawan. Ia yakin jika bukan wartawan, mereka tak akan

memberikan uang padanya. Ia menyebut, ketika itu mungkin posisinya mendesak untuk menolak.

Pemberian semacam itu juga diakuinya memengaruhi independensinya terhadap orang tersebut ketika menjadi narasumber. Ada perasaan tidak enak dalam hati Doni karena dia pernah memberikan pertolongan. “Ketika itu hubungan dia dengan gubernur itu kurang harmonis. Nah ketika ada isu itu, aku jadi susah untuk mengambil sikap karena ada perasaan tidak enak tadi,” katanya.

Independensi Doni kembali terganggu tatkala ia memanfaatkan profesinya sebagai jurnalis untuk mendapatkan akses tertentu. Ia menceritakan ketika suatu kali mengurus KTP di kelurahan tempat tinggalnya, Pasar Merah Timur. Karena ia wartawan, pihak kelurahan memberikan fasilitas padanya dengan tidak membebankan biaya apa pun alias gratis dan dalam waktu yang singkat tanpa banyak persyaratan. Suatu ketika, orang yang membantunya tersebut terkena masalah terkait pengerukan sampah. Warga mengeluh, tetapi Doni tak bisa memberitakan karena merasa punya utang budi tadi. “Biasanya *gak* ada tekanan, tapi kan perasaan tadi. Palingan aku telepon dia, terus dijelaskan masalahnya, udah. Biasanya *gak* ku tulis karena aku takut *gak* objektif menulisnya.”

Situasi seperti ini menurutnya masih sering terjadi, seperti saat mengurus SIM atau kartu keluarga. Hubungannya antar orang-perorang, tapi kemudian berimbas pada institusi tempat orang tersebut bernaung. Jadi ketika institusi tersebut bermasalah, Doni merasa susah untuk bersikap objektif.

Itulah sebabnya ia tak mau menerima amplop. Ia takut pemberian itu justru akan mencelakakannya. Doni mengungkapkan, dari beberapa kasus wartawan yang terjadi, awalnya diakibatkan wartawan tersebut menulis berita tidak sesuai dengan pesanan, padahal ia telah menerima uang. Doni pun takut karena pemberian itu, ia menjadi susah saat menulis.

Meski begitu, ia menyatakan tak pernah kaku menjalin hubungan dengan narasumber. Secara pribadi, di luar waktu wawancara, ia sering berdiskusi, bertandang ke kantornya atau melalui telepon. Diskusi itu biasanya tak menjadi bahan berita, hanya sebagai penambah wawasan dan bertukar informasi.

AJI sendiri menurutnya sudah cukup tegas menyatakan sikapnya menolak amplop. Ia kemudian menunjukkan kartu anggota miliknya, di mana pada bagian belakang tercantum kode etik AJI. Sikap menolak amplop ini menurutnya berasal dari dirinya secara pribadi, tak banyak pengaruh dari AJI. Ia hanya khawatir lingkungan sekitar menjadi pengawas dengan statusnya sebagai anggota AJI, khawatir ada yang mengadakan perbuatan negatifnya. Pengawasan sendiri tidak ada yang ketat, organisasi menurutnya tidak ada melakukan pengawasan. Hanya jika ia terbukti salah, organisasi siap memberikan sanksi.

Sejak ia bergabung, belum ada anggota yang terkena sanksi akibat terbukti menerima amplop. Ia hanya tahu pernah terjadi, tapi dalam kurun waktu yang cukup lama, serta pernah ada anggota lain yang mengadakan di dalam rapat tapi hanya sampai di pembahasan. Jika ia melihat temannya sesama anggota AJI menerima amplop, ia memilih untuk tak mengambil sikap apa pun. Ia tak ingin ada kerenggangan hubungan

setelah itu. Doni hanya berharap temannya tersebut mendapat ilham dari Tuhan agar sadar dengan apa yang ia lakukan.

Menyikapi persoalan ini, Doni tak ingin hanya melihat pada satu sisi. Pemerintah yang selama ini kerap membagi-bagikan pada wartawan, menurutnya hanya untuk mencari pengambinghitaman. Budaya amplop ini sengaja dipelihara. Mereka selalu berharap wartawan mau menerima duit, karena jika tidak mau menerima, para pejabat pasti takut. Selain itu menurut Doni, orang-orang yang berkepentingan tersebut bisa menggunakannya untuk mendapatkan anggaran. Ini sudah menjadi permainan. Jadi ketika ada wartawan yang tidak menerima uang sama sekali pun, gampang mematahkannya. Memang sengaja dikondisikan seperti itu. Ia menyebut, pengambil kebijakan di negeri ini punya kepentingan agar wartawan tetap mau menerima duit.

Doni beranggapan, budaya negatif ini dapat diberantas jika tak ada lagi yang memberi. Menurutnya, jika pemerintah ketat dan tak ada satupun yang memberi uang, budaya ini pasti akan mati sendiri. Bagi seorang wartawan, menurut Doni, faktor keuangan tak bisa menjadi alasan karena profesi ini telah menjadi pilihan hidup dia.

Ia kemudian menyarankan agar tidak menjadikan profesi wartawan sebagai mata pencaharian utama. Ia punya prinsip, tidak satu profesi yang bisa membuat ia hidup, ada banyak keterampilan yang bisa. Ia bisa tetap menulis tapi 'dapur'nya tak terganggu. Doni menyatakan, ia terpaksa mencari penghasilan lain walaupun itu tidak dibenarkan. Hal ini menurutnya justru bisa menjadi salah satu solusi.

Informan 3

Budi (Nama Samaran)

Setelah beberapa kali mengatur janji, akhirnya Budi bersedia ditemui. Pada suatu siang ia mengabarkan untuk menemuinya di sebuah instansi pemerintahan tempat ia biasa memburu berita. Hari itu sebenarnya ia libur kerja, karena keesokan harinya merupakan libur nasional sehingga koran tak terbit. Ia hanya memantau perkembangan di sana agar tak kebobolan berita. Waktunya pun lebih luang, kami secara leluasa berbicara panjang-lebar.

Budi memulai karir sebagai wartawan sejak 2007. Ketika itu bulan Maret, ia mengirim lamaran pada sebuah surat kabar dengan oplah tergolong besar di Sumatera Utara. Usai menjalani masa magang selama beberapa bulan, ia pun diangkat sebagai karyawan. Ia memilih profesi ini berawal dari kesukaannya pada tulis-menulis. Budi memang hobi menulis. Ia bisa menulis apa yang ia rasakan dan lihat. Namun ini bukan masa depannya. Alasan lain, karena profesi ini ia rasa bisa menjadi batu loncatan untuk jenjang karir yang lebih baik, meski belum tahu bidang apa. Saat ini ia hanya bermimpi bisa memiliki sebuah media yang tidak ada campur tangan dari siapa pun, termasuk pemiliknya sendiri. Impian yang sama dengan anak-anak AJI lain, ia rasa.

Ingin aktif di organisasi, Budi kemudian masuk organisasi profesi. AJI yang dia pilih. Beberapa alasan ia jadikan pertimbangan. AJI menurutnya memiliki aturan yang ketat untuk menaati kode etik, sehingga para anggotanya didorong untuk lebih profesional. Wartawan AJI hanya menjalankan tugas-tugas jurnalistik, tidak boleh menerima pamrih dari narasumber. Selain itu semangat AJI untuk memperjuangkan kesejahteraan jurnalis, juga sejalan dengan pikirannya. AJI juga berani menolak anggaran dari pemerintah bagi organisasi wartawan. Hal ini menurutnya berbeda dengan organisasi lain seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang memang punya nama besar dan menerima Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut setiap tahun. Sudah sejak lama ia ingin masuk AJI.

Berbagai kegiatan rutin dilakukan AJI sejak ia terdaftar sebagai anggota. Seperti peringatan Journalist Day, survei upah layak, serta menjadi pembicara atau moderator di berbagai acara. Ia juga pernah menjadi pembicara salah satu kegiatan pelatihan jurnalistik, mewakili AJI. Selain itu AJI Medan juga berencana membuat sebuah buku yang memaparkan standar gaji wartawan di Medan. Tapi Budi belum tahu kapan buku itu akan selesai.

Independen berarti memberikan fakta tanpa ada pengaruh apa pun, menurutnya. Ia menambahkan, tanpa ada subjektivitas pemilik, tanpa ada pengaruh narasumber. Kepentingan yang diutamakan adalah kebenaran. Menurut Budi, setiap isu pasti ada kepentingannya, tapi kepentingan bagi seorang wartawan adalah fakta.

Budi menyatakan, seorang wartawan dapat dikatakan tidak independen ketika subjektivitas dia masuk ke dalam pemberitaan. Kemudian ketika ia mengedepankan

tokoh-tokoh yang punya kekuasaan, maka patut dicurigailah si wartawan itu. Seperti ketika ada penggusuran pedagang kaki lima, yang dipaparkan justru kebaikan dari lingkungan itu digusur, tanpa melihat dampak negatif bagi masyarakat.

Perusahaan media tempat Budi bekerja membayar wartawannya dengan berbagai kompensasi. Ia mendapat gaji pokok Rp 1 juta per bulan. Setiap wartawan di kantornya mendapatkan gaji yang berbeda, sebab itu ia mewanti-wanti peneliti untuk tidak menyebutkan nama medianya. Selain gaji, ia mendapat tunjangan jabatan Rp 75 ribu/bulan, transportasi Rp 50 ribu/bulan, uang makan Rp 7.500/hari, uang piket Rp 15 ribu/malam, serta asuransi kesehatan. Piket berarti siaga di kantor hingga pukul 24.00. Ia mendapat jatah 4-5 kali piket tiap bulan. Selain itu dengan jabatannya sekarang, ia kerap ditugaskan membantu atasannya jika yang bersangkutan absen atau cuti. Ia mendapat upah Rp 15 ribu perhalaman. Tapi pekerjaan ini tak pasti, tergantung ada yang cuti atau tidak. Media tempatnya bekerja juga memberikan bonus bagi wartawan yang beritanya menjadi headline. Rp 100 ribu/berita bagi headline halaman satu dan Rp 35 ribu/berita bagi headline di halaman lain. Ada pula rapor bulanan. Jadi tiap berita yang naik ada poinnya masing-masing. Peringkat satu akan mendapat Rp 150 ribu, peringkat dua Rp 100 ribu dan peringkat tiga Rp 50 ribu. Penilaian itu berlangsung setiap bulan. Ia sendiri jarang mendapatkan bonus atau poin-poin itu karena wilayah liputannya tidak termasuk berita yang strategis.

Tak hanya mengerjakan satu jabatan, di kantornya Budi juga mendapat kepercayaan membantu media lain milik induk medianya. Setiap bulan ia mendapat Rp

400 ribu dari pekerjaan tambahan itu. Meski mengakui gaji yang ia terima di bawah UMR, namun menurut Budi hal itu tertutupi dengan berbagai kompensasi yang diberikan.

Selain bekerja di media *mainstream*, Budi juga mencari pendapatan dari tempat lain. Ia mengerjakan majalah internal milik salah satu instansi pemerintah. Mengikuti teman, alasannya. Ia bertugas di lapangan, menulis berita-berita seremonial instansi itu. Setiap terbit ia mendapat Rp 500 ribu. Media ini terbit sebulan sekali. Selain itu ada juga media internal lain yang dikerjakannya, milik sebuah perusahaan BUMN. Ia juga mendapat Rp 500 ribu/terbit dari pekerjaan itu. Media itu seyogianya terbit sebulan sekali, tapi saat ini sudah tak rutin, terkadang tiga bulan sekali, tergantung kegiatan mereka. Ia juga sempat menjadi kontributor salah satu media online, namun menurutnya saat ini sudah tak jelas kelanjutannya.

Budi harus melakoni banyak pekerjaan itu demi mencukupi kebutuhan ‘dapur’-nya. Ia menyebut kebutuhannya setiap bulan sesuai dengan hasil survei AJI awal tahun ini atau sekitar Rp 3,2 juta, dengan rata-rata per hari sekitar Rp 150 ribu. Kebutuhan ini sudah termasuk biaya sewa rumahnya per tahun. Sementara istri Budi tidak bekerja dan saat itu sedang mengandung.

Minimnya pendapatan yang ia dapat membuatnya terkadang harus meminjam uang pada teman demi mencukupi kebutuhan. Untungnya, waktu pembayaran dari berbagai pendapatan itu berbeda-beda. Jika dari kantor awal bulan, maka dari pekerjaan lain saat pertengahan bulan. Sehingga bisa saling menutupi. Adakah ia menerima amplop sebagai tambahan pemasukan? “Di AJI haram itu. (Diam) kadang pernah juga sih cuman bukan kaitannya dengan berita,” ungkapnya.

Ia memberi contoh, ketika ia membuat kegiatan kemudian memberikan proposal ke walikota. Biasanya kalau wartawan yang buat, pasti dikasih bantuan. Beberapa yang pernah ia masukkan seperti kegiatan remaja atau saat pembangunan mesjid di dekat rumah Budi. Selain itu ketika ia membuat hajatan, Budi memberi undangan ke anggota DPRD. Ia tak meminta uang. Tetapi anggota dewan meneleponnya minta nomor rekening. Ia pun menerimanya. Meskipun tak meminta, ia sadar jika perbuatannya tak dibenarkan dalam tubuh AJI. Karena apa pun dia kalau berkaitan dengan narasumber, itu pasti bisa menjadi semacam intimidasi. Menurutnya, orang itu mengenal dirinya sebagai apa? Tentu sebagai wartawan.

Sehari-hari di lapangan, ia kerap berhadapan dengan narasumber yang ingin memberikan uang pada wartawan. Ia tak menolak seluruhnya. Jika sudah kenal, Budi akan menerima uang itu. Ia memilah-memilih sesuai karakter masing-masing orang. Menurutnya, ada narasumber yang memang memberikan tanpa mengharapkan apa-apa dari si wartawan. Jadi hanya sekedar memberikan, misalnya dengan menyelipkan pada kantung baju atau celananya. Meskipun ia kembali mewanti-wanti jika hal seperti itu juga dilarang di AJI.

Selain mengaku selektif saat menerima dari narasumber, Budi juga melihat momen pemberiannya seperti apa. Jika saat konferensi pers atau kegiatan seremonial, ia memilih untuk tak menerima. Ia tak mau yang seperti itu karena menurutnya motif pemberian sudah jelas, agar kegiatan itu dipublikasikan. Terkadang juga dimanfaatkan untuk mempermulus penyebaran press rilis, yang biasa berisi klarifikasi atau promosi.

Budi berusaha meminimalisir pemberian-pemberian seperti itu. Meskipun terkadang ia susah menolak jika pemberian itu disampaikan melalui temannya atau dititipkan melalui koordinator. Hubungannya dengan teman wartawan tadi bisa terganggu akibat menolak pemberian, Budi dianggap tak mau berteman lagi. Hubungan dengan narasumber juga kadangkala menjadi terganggu. Akibat tak mengambil pemberiannya, narasumber menjadi ketakutan dan berpikir Budi akan mencari kesalahan-kesalahan dia. Ia pun sulit saat akan diwawancarai kembali. Padahal dengan tidak menerima pemberian narasumber, Budi merasa lebih lega. Ia merasa tak menanggung beban apa pun.

Nominal yang Budi dapatkan jika menerima amplop, bervariasi. Biasanya berkisar antara Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu. Ia dapat dari kegiatan yang bersifat seremonial. Budi beralasan, jika tidak ikut menandatangani absen, maka namanya akan ditandatangani orang lain dan uangnya diambil oleh orang itu. Sedang jika narasumber memberikan secara langsung saat wawancara, Budi akan langsung menolak. Ia biasanya berusaha menjelaskan jika tujuannya hanya ingin wawancara. Namun tak semua narasumbernya memahami, terutama mereka yang sebelumnya memang tak kenal Budi. Seorang narasumber pernah merasa tak enak pada Budi akibat menolak pemberiannya. Saat itu Budi baru menjadi wartawan. Ketika ia menolak, keesokan harinya si narasumber menelepon dan menyampaikan rasa tidak enaknya seraya menjelaskan tak ada maksud apa-apa dari uang itu. Sebab itu Budi harus menyesuaikan, ada narasumber yang ketika ditolak pemberiannya akan semakin baik, tapi ada juga malah semakin semakin jauh. Budi akan melihat motif si pemberi sebelum memutuskan untuk menerimanya.

Ia sendiri sulit menjelaskan narasumber seperti apa yang takkan ia tolak, tergantung karakter orangnya. Ia akan melihat orang itu menjalin kedekatan, bertujuan untuk apa. Budi bercerita, ada seorang Wakil Ketua DPRD yang tidak pernah ia terima duitnya. Alasannya, orang itu baik dan kinerjanya juga bagus. Tapi ia tak memungkiri jika sering menikmati uang dalam bentuk lain dari orang itu. Pemberian yang sifatnya pribadi, seperti pemberian sumbangan saat Lebaran, atau sumbangan-sumbangan lain. “Aku jujur aja, udah di AJI aku pernah juga terima amplop itu. Tapi kalau misalkan dia konferensi pers ya gak kuterima.”

Ia mengaku tak pernah menerima protes dari narasumber yang telah memberikan amplop akibat berita yang dianggap tak sesuai. Sejak awal Budi sudah menjelaskan jika ia tak bisa menjamin berita itu naik, juga ia takkan menjamin berita itu sesuai dengan kehendak narasumber. Ada pemberian atau tidak, ia tak terpengaruh. Budi akan menulis apa adanya sesuai fakta yang ada. Bahkan tergolong sering menulis berita negatif meski sudah menerima amplop.

Ada dua alasan utamanya menerima amplop. Menjaga narasumber dan memenuhi kebutuhan, saat ia sedang tak punya uang. Budi memiliki strategi khusus. Ia tak menerima saat sedang melakukan wawancara, melainkan meminta dengan narasumber di tempat ia *ngepos* sebelumnya sehingga tak akan terkait dengan berita yang akan ditulisnya. Jadi orang itu memberi karena hubungan yang terjalin sebagai wartawan, bukan karena dia ingin dipublikasikan. Ia tak berani menerima atau meminta dengan narasumber di tempat ia *ngepos* saat ini karena pasti akan terkait langsung dengan pemberitaan. Ketika ia tak lagi *ngepos* di sana, baru ia akan berani. “Kadang memang ada

pengaruh itu makanya jadi tidak independen itu tadi. Karena apa pun ceritanya itu pasti akan memengaruhi kita,” katanya.

Budi justru tak pernah menerima amplop saat sebelum masuk AJI. Ketika itu ia masih lajang, gaji Rp 800 ribu yang diterima ketika itu sudah cukup menurutnya. Itulah sebabnya ia menyatakan, semua ini karena faktor ekonomi. Harusnya jika survei AJI itu diikuti, ia yakin persoalan amplop ini dapat diminimalkan.

Media tempat Budi bekerja memang memberi kelonggaran terhadap para wartawannya. Mereka tidak dilarang untuk menerima selama tidak merusak nama perusahaan. Ia memberi contoh cara yang biasa dilakukan. Misalnya sumber berita itu punya produk, kemudian ada isu yang berkaitan. Jika si wartawan mau selamat dan dia juga mau memberi imbalan, akan lebih baik menurutnya jika ditawarkan iklan. Kemudian isu itu pun akan dianggap tidak pernah ada. Budi pernah mempraktekkan itu langsung. Waktu itu ia tak mau terima imbalan sementara narasumber tetap ingin memberikan. Ia pun menggunakan cara tadi, menawarkan iklan dengan jaminan berita itu tak akan naik lagi. Terbukti, ketika iklan dipasang, berita yang menyudutkan itu pun tak lagi muncul. Budi mendapat fee 15% dari total harga iklan. Menurutnya cara seperti ini sama-sama saling menguntungkan. Selain itu ketika sumber liputan merupakan sebuah kegiatan, bisa ditawari untuk memasang iklan ucapan selamat.

Sejauh ini Budi berusaha menjaga independensi yang harus ia jalankan sebagai wartawan. Secara pribadi ia memang tidak bisa terlalu dekat dengan orang termasuk narasumber. Ia selalu menghindari jika diajak terlibat dalam urusan pribadi. Media-media internal yang dikerjakannya juga ia anggap tak mengganggu karena hanya bersifat media

komunitas. Ia hanya bekerja di balik layar, sehingga namanya tak pernah tercantum pada setiap lembar media itu. Sebab itu meski menulis berita yang sama untuk media tempatnya bekerja, Budi dapat menyoroti dari sisi yang lain.

Secara organisasi, AJI tak banyak berpengaruh dalam membentuk sikapnya sebagai wartawan. Budi menceritakan, sebelum masuk AJI ia malah menolak amplop, malah ketika masuk AJI ia menerima amplop. Itu sebabnya, ia menyebut semuanya berpulang pada pribadi masing-masing, tak ada kaitan dengan AJI. Organisasi itu menurutnya, hanya menjadi pengingat dirinya pada rambu-rambu sebagai wartawan.

Menyikapi permasalahan amplop ini yang kemudian berdampak pada independensi jurnalis, Budi hanya punya satu solusi. Upah layak bagi wartawan. Standar upah layak itu menurutnya, harus didorong terus. Jika upah layak dapat dipenuhi, ia yakin akan semakin mudah menyadarkan wartawan untuk tidak ‘menjual diri’ kepada narasumber.

Responden 4

Gery (Nama Samaran)

Setelah mencapai kesepakatan waktu wawancara, peneliti kemudian menemui Gery di kantornya. Namun proses wawancara urung terjadi malam itu. Gery sedang banyak pekerjaan. Awalnya dia mengira wawancara dapat dilakukan secara tertulis, ia menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dalam bentuk tulisan. Peneliti menolak cara itu dan

akhirnya disepakati wawancara berlangsung esok siang di kantin salah satu universitas di Kota Medan. Keesokan harinya, sesuai waktu yang telah ditentukan, wawancara pun berlangsung santai meski sesekali terganggu dengan ‘pengunjung’ yang singgah ikut mendengarkan.

Awalnya tahun 2000. Alumni dari fakultas tempat Gery kuliah banyak yang terjun ke dunia jurnalistik. Ia pun tertarik mengikuti jejak para seniornya. Apalagi sebelumnya Gery memang biasa menulis. Berbagai permasalahan di kampus yang kerap memenuhi pikirannya, ia lampiaskan dalam bentuk tulisan.

Gery memulai karirnya di sebuah media berjangkaran nasional. Tak kurang dari delapan tahun ia bekerja di media itu. Ia mengaku banyak belajar di sana, hingga akhirnya dapat menarik kesimpulan, jika karir tertinggi di media hanya sampai posisi redaktur pelaksana sedangkan pemimpin redaksi sifatnya subjektif ditunjuk berdasarkan kepercayaan pemilik modal.

Gery kemudian memilih AJI sebagai organisasi profesi yang ingin diikuti. Persoalan prinsip ia sebut sebagai alasan utama kenapa memilih organisasi itu dibanding organisasi profesi lainnya. Bagi Gery, AJI merupakan satu-satunya organisasi wartawan yang berteriak tentang upah layak, profesionalisme, dan menegakkan kode etik. Ia bergabung sekitar enam tahun lalu. Masuk AJI menurutnya sulit, berbeda dengan PWI yang justru membuat orang berlomba-lomba masuk ke sana. PWI memberikan banyak fasilitas pada anggotanya, salah satunya rumah atau tempat tinggal.

Selama menjadi anggota AJI, Gery mengaku cukup aktif. Hanya saat ini ia sudah jarang kumpul dengan anggota yang lain. Anak-anak AJI menurutnya, kini lebih ramai di milis daripada kumpul-kumpul bersama.

Independensi menurutnya sesuatu yang bebas. Tidak terganggu, tidak merasa segan, tidak ada kepentingan tertentu, sebagai wartawan berdiri di semua kelompok. Berpihak menurutnya tetap boleh, tapi berpihak dengan orang-orang yang sulit mengakses media. Ia kemudian memberi contoh, sebuah perusahaan pasti lebih mudah mengumpulkan wartawan, tinggal sms, esok hari beritanya bisa langsung naik. Bandingkan dengan masyarakat yang tinggal di tepi Sungai Deli, yang air bersihnya hanya hidup dini hari. Mereka tidak punya telepon, apalagi nomor telepon wartawan. Mereka-mereka itulah yang lebih penting didatangi wartawan. Mereka jelas tak memiliki akses apa pun kepada wartawan. Gery menegaskan, bisa jadi wartawan itu seharusnya mengutamakan masyarakat kecil karena biasanya ketika mereka itu teriak pasti ada sesuatu, pasti mereka sedang terjepit.

Gery mengungkapkan, satu hal yang membuat independensi jurnalis di Medan ini semakin melemah, yakni adanya koordinator di masing-masing pos wartawan. Ia bercerita, pada setiap pos biasanya ada yang sudah *ngepos* sejak bertahun-tahun, menjadi semacam sindikat. Hal inilah yang nantinya menjadi kendala bagi wartawan baru yang terjun ke lapangan. Dia bukan berhadapan dengan narasumber nantinya, tapi yang lebih fatal berhadapan dengan wartawan-wartawan tua yang *ngepos* di situ.

Gery kemudian memberi contoh pengalamannya sendiri saat *ngepos* di salah satu instansi pada 2005. Ketika itu ada seorang wartawan yang sudah sangat lama *ngepos*

disitu. Dia merasa semua wartawan yang *ngepos* di situ adalah anak buahnya. Jadi saat Gery ingin bertanya, dia akan lebih dulu menyortir pertanyaan itu. Gery merasa seperti ada teror mental. Tidak hanya satu-dua hari, tapi tiap hari. Jika mentalnya tidak kuat, pasti ketakutan dan bergabung dengan dia. Apalagi orang itu menurut Gery banyak memberikan hadiah, mengajak makan, karaoke dan berbagai keuntungan lain. Ia menambahkan, kelompok-kelompok seperti ini selalu ada di setiap pos, dari mulai hukum, ekonomi, politik bahkan hiburan.

Gery menambahkan, sebagian besar wartawan pada suatu pos akan bergabung dengan kelompok-kelompok itu. Setiap tahun akan dipilih masing-masing koordinatornya. Perusahaan media menurutnya tak ambil pusing dengan hal ini. Hanya di beberapa koran yang melarang wartawannya menjadi koordinator, tapi tetap boleh bergabung dengan yang lain. Posisi koordinator itu menurut Gery kerap menjadi rebutan. Seorang koordinator akan memiliki akses yang hebat. Ia bisa menemui siapa saja, bahkan menelepon walikota akan langsung diangkat. Tugasnya tak ada yang pasti. Orang ini, kata Gery, hanya dibutuhkan jika ada situasi-situasi genting, misalnya ada kasus yang menerpa instansi itu. Untuk memudahkan dan menertibkan wartawan yang dianggap 'rewel', maka dipanggilah koordinator itu oleh pihak instansi. Ia akan diminta untuk menertibkan dan mengkoordinir 'hadiah' bagi para wartawan. Beberapa waktu lalu, sebelum nama KPK mulai menggema, bentuk hadiahnya bisa berupa jalan-jalan ke luar negeri.

Gery pernah ikut menikmati hadiah itu. Saat itu kegiatan yang ia ikuti diberi nama, studi banding lalu lintas antara Medan, Penang, Kuala Lumpur dan Hatyai

Thailand. Usai 'studi banding' ia menuliskan apa adanya dari pengalaman yang dilihatnya saat mengunjungi kota-kota tadi. Lalu lintas Medan jelas jauh tertinggal. Teman-temannya yang lain rupanya tak senang dengan perbuatan Gery. Mereka menganggap Gery keterlaluhan, sudah mendapat jalan-jalan gratis tetapi justru menulis yang 'aneh-aneh'. Gery ingat sekali, ketika ia dimarahi teman-temannya yang lain. Dana kegiatan itu memang seluruhnya berasal dari instansi tempatnya *ngepos*. Gery mengaku keikutsertaannya atas persetujuan perusahaan media tempat ia bekerja dan berlangsung setahun sebelum ia masuk AJI.

Kegiatan 'studi banding' seperti itu saat ini sudah jarang terlihat. Menurut Gery, sekarang modus barunya dengan membuat kegiatan-kegiatan seperti turnamen futsal atau lomba tulisan. Mereka membuat kegiatan atas nama wartawan, yang menjadi ketua panitia tentu sang koordinator wartawan. Sementara dana penyelenggaraannya berasal dari instansi tersebut.

Gery mendapat gaji pokok Rp 1,5 juta dari medianya saat ini. Selain itu tiap bulan ia juga mendapat tunjangan jabatan Rp 500 ribu, uang kerajinan Rp 50 ribu, uang makan Rp 10 ribu/hari, asuransi Jamsostek. Jika ditotal sekitar Rp 2,3 juta sebulan. Namun kompensasi yang ia dapat akan dipotong jika terlambat masuk kerja. Biaya pemotongan sekitar Rp 168 per menit. Gaji yang wartawan lain di media itu tak sama dengannya. Ia memang berkeras meminta gaji sebesar itu saat mendapat tawaran kerja, demi memberi penghidupan yang layak pada istri dan dua anaknya.

Selain pendapatan dari perusahaan, Gery juga menerima pemasukan lain dari hasil menulis. Sifatnya tidak rutin karena tergantung orderan, misalnya menulis buku.

Proyeknya yang paling anyar, ia mendapat keuntungan bersih Rp 10 juta. Pekerjaan ini jarang ia dapat, setahun sekali pun belum tentu. Sedangkan istri Gery menerima gaji pokok setiap bulan Rp 2,4 juta. Ia seorang pegawai.

Gery tak tahu nominal pengeluaran keluarganya sebulan. Keuangan seluruhnya dikelola oleh istrinya. Ia tahu beres. Yang pasti anaknya dua orang dan biaya kontrak rumah Rp 4,5 juta pertahun. Secara keseluruhan pengeluaran mereka masih bisa teratasi. Meski ia masih sering meminjam dari kantor untuk membeli pulsa.

Gery sempat meninggalkan profesi ini sekitar dua tahun lalu. Selama sembilan bulan ia tak bekerja di media mana pun. Ia membuat pelatihan-pelatihan jurnalistik dan tetap menulis sesekali. Sebuah masalah pribadi dan kegundahannya bekerja di media menjadi alasan utama ia membuat pilihan ketika itu.

Ya, kegundahan yang telah membuatnya merasa frustrasi sebagai wartawan saat ini. Gery menceritakan bagaimana perasaannya hancur ketika sebuah kasus besar hasil liputannya yang melibatkan Walikota Medan Rahudman Harahap, tidak boleh naik oleh pemilik koran. Begitu juga ketika adik kandung Gubernur Sumut non aktif tertangkap membawa shabu-shabu, beritanya tak boleh naik. Ia tak habis pikir karena itu sebuah peristiwa dan dimuat oleh koran-koran lain di Medan. Sebab itu, ia mengatakan saat ini bekerja hanya apa adanya saja. Sekedar kerja, biar tak malu dengan istrinya yang bergaji lebih besar dari Gery.

Ia juga kecewa karena banyak media yang tak menyanggupi gaji yang ia minta. Padahal angka Rp 2 juta menurutnya tergolong kecil, angka yang tak seberapa

sebenarnya pada perusahaan media besar. Ia pun menggunakan kata “katrok” untuk menyebut media-media di Medan. Sekitar setahun lalu ia sebenarnya pernah mendapat tawaran gaji Rp 3,5 juta dari sebuah media nasional. Ia pun senang dan siap memberikan seluruh waktunya bagi media itu. Namun langkahnya terhambat karena informasi ia pernah membuat ‘masalah’ di media sebelumnya, telah beredar.

Gery memang bertengkar hebat dengan pimpinan media tempat ia bekerja ketika itu terkait pemberitaan. Salah satunya ketika berita tentang dugaan ijazah palsu Rudolf Pardede, gubernur ketika itu, tak lagi boleh naik. Padahal oplah sempat meningkat akibat berita itu. Ternyata pimpinan media itu telah menerima uang untuk menghentikan berita tadi. Sedangkan ketika Gery dan wartawan lain meminta naik gaji, mereka justru dianggap bisa menerima dari luar sehingga gaji dari kantor cukuplah seperti itu.

Saat ditanya pertama kali, Gery mengaku tak pernah menerima amplop. Tapi ia kemudian bercerita, ketika masa-masa awal menjadi wartawan pernah menerima Rp 7,5 juta. Awalnya ia tak tahu itu uang apa dan diberikan oleh koordinator tempat ia *ngemos*. Itulah menjadi dana awalnya membeli sepeda motor. Sisanya ia bagi dengan teman-teman lain di kantor. Sekian lama setelah itu ia baru tahu ternyata memang ada honor dari instansi bagi wartawan *ngemos* di sana. Jumlahnya pertriwulan dan itulah triwulan pertamanya. Saat ini menurutnya sudah tak ada lagi yang seperti itu, makanya wartawan yang menerima gaji pas-pasan sudah mulai teriak sekarang.

Selain itu ia tak mengelak masih menerima yang lain. Pada prinsipnya ia menegaskan tak pernah meminta atau memeras, tapi jika diberi dengan cara yang santun ia akan ambil. Misalnya, Gery membuat kegiatan dan mengajukan proposal pada pejabat

atau orang yang biasa menjadi narasumbernya. Biasanya mereka akan memberikan dalam bentuk uang. Itu juga menurut Gery tidak untuknya pribadi tapi membantu orang lain yang menitipkan padanya.

Amplap juga sebenarnya sesekali ia terima. Ia memberi contoh ada berita rilis yang masuk ke emailnya. Intinya si pengirim meminta tolong agar beritanya dinaikkan. Esok hari saat orang itu mengajak makan, ia akan ikut. Orang itu memberi uang, Gery juga akan ambil. Meski begitu, ia tetap berusaha membatasi. Menurutnya ada dua tipe wartawan terkait amplap, ada tipe penyerang dan tipe penonton. Ia berada di tipe kedua.

Gery menjelaskan, pihak yang memberikan itu bisa bermacam-macam tergantung kenalan. Kebetulan ia sempat lama *ngemos* di hiburan. Jadi berita yang biasa masuk terkait acara-acara musik. Kalau penyelenggaranya perusahaan rokok, biasanya tidak memberikan uang tapi rokok berslot-slot. Perusahaan seluler juga begitu. Mereka biasa memberikan souvenir atau HP.

Ia juga terkadang mau menerima pembagian dari koordinator. Namun hanya berita-berita yang sifatnya seremonial. Ia memberi contoh, ketika toko kue Majestyk buka cabang baru, biasanya akan dipanggil satu orang wartawan. Mereka akan meminta bantuan publikasi dan si wartawan akan melakukan koordinasi dengan wartawan lain sesuai besaran dana yang diberikan. Gery menyebutkan posisi mereka semacam perusahaan public relations. Jadi menjual jasa publikasi. Gery mau menerima pemberian yang seperti ini karena beritanya tergolong ringan. Selain itu memang punya nilai berita, jadi ada uang ataupun tidak, beritanya tetap akan naik.

Lalu kenapa Gery tetap mau menerima? Ia justru bertanya balik, maukah kau jika namamu ditandatangani orang? Ya, itulah alasannya. Ia tak terima jika orang yang menikmati sementara yang tercatat adalah namanya. Gery pernah mengalami kejadian tak sedap terkait penggunaan nama ini. Ketika itu narasumber yang ia wawancarai ingin korannya diantar setelah terbit. Gery tak mau melakukannya. Tiba-tiba narasumber itu menelepon, menanyakan sudah sampai kiriman darinya. Gery terkejut, ia merasa tak meminta apa pun. Ternyata ada wartawan yang mengaku anggotanya dan mengantarkan koran ke narasumber itu.

Besaran uang diberi biasanya tak tentu. Jika yang sudah senior menurutnya tak biasa lagi menerima ratusan ribu. Misalnya Gery memberikan mereka Rp 150 ribu, biasanya mereka hanya meminta diisikan pulsa tapi kalau Rp 1 juta ke atas, baru mereka mau terima tunai. Sedangkan Gery mengaku tidak seperti itu. Ia kemudian memberikan jawaban sambil bercanda. “Aku mana pakai harga, apa yang mau diberitakan sekarang? Teken pun gak mau aku kalau yang gak jelas-jelas. Anak AJI anti amplop, jadi gak pakai amplop aku, pakai goni. Hahaha..”

Fasilitas pemberian narasumber terkadang juga ia nikmati, meskipun tak menerima langsung, tapi ia turut serta. Biasanya Gery ramai-ramai dengan wartawan lain. Sekedar penghilang suntuk atau kecapekan habis liputan, katanya. Ia mengatakan, wartawan yang handal mengurus itu biasa yang *ngepos* di kepolisian. Kalaupun tak gratis, pasti mereka dapat potongan harga separuhnya dari pengelola tempat karaoke. Tapi itu dulu, katanya, ketika masih lajang.

Pemberian narasumber dalam bentuk pribadi tak pernah ia terima. Sebab, jika ia butuh ia akan langsung sampaikan. Seperti saat istrinya melahirkan, ia menghubungi orang-orang yang biasa menjadi narasumbernya untuk memohon doa. Tentu permintaan doa hanya basa-basi, mereka pun masing-masing memberikan uang. Namun bagi Gery, pemberian mereka sebagai sahabat. Ia berusaha menjaga persahabatan agar tak terkait pemberitaan. Jadi, tidak ada pesan-pesan khusus terkait berita setelah mereka memberikan uang.

Gery biasanya selektif terhadap orang-orang yang ingin dimintainya bantuan, yaitu mereka yang sudah tak lagi menjadi narasumbernya. Cara yang sama seperti yang dilakukan responden sebelumnya, Budi. Ia tak ingin ada satu pun narasumbernya yang takut keluar uang saat melihat namanya muncul di layar ponsel. Gery menjamin jika satu pun tak ada yang terkait pemberitaan.

Ia kemudian memberi contoh pengalamannya dengan mantan Walikota Medan Abdillah. Saat kasus Abdillah diajukan ke KPK oleh LSM Fitra, banyak klipng koran yang dijadikan salah satu bukti. Setelah dilihat, ternyata banyak berita hasil liputannya. Padahal ia mengaku dulu begitu dekat dengan yang bersangkutan. Sebagai bukti, ia menunjukkan pesan Blackberry Messenger (BBM) antara dirinya dengan istri Abdillah baru-baru ini. Gery ingin membuktikan meski ia memiliki andil atas dipenjaranya Abdillah, tapi hubungan baik tetap dijaga. Saat Abdillah dipenjara, ia datang berkunjung. Padahal Gery mengaku tak menerima apa-apa. Ketika Abdillah masih menjabat, ia dan wartawan lain pernah ditawari sebuah mobil. Namanya sudah tercatat di salah satu gerai untuk mengambil sebuah Daihatsu Xenia. Wartawan lain yang mendapat 'jatah' tak

menyia-nyiakan kesempatan itu. Gery menolak. Ia pun rela hingga kini kerap dibilang bodoh oleh istrinya.

Secara pribadi Gery tak menampik jika amplop atau pemberian narasumber lain dapat memengaruhi wartawan dalam menulis berita. Tapi ia menyangkal jika apa yang ia lakukan dapat memengaruhi dirinya. Ia kembali menceritakan pengalamannya. Gery cukup dekat dengan perusahaan Inalum. Sebab itu ia sering mengikuti kegiatan-kegiatan perusahaan aluminium itu. Biasanya selalu ada amplop di akhir acara. Salah satunya saat Inalum memaparkan capaian-capaian mereka selama setahun. Gery turut menerima amplop. Kenapa? Karena menurutnya tak ada yang memengaruhi. Sebab, tak ada yang perlu dikritisi. Tidak ada duitnya pun berita itu tetap akan naik.

Gery menyatakan, tak mau menerima pemberian yang langsung diserahkan narasumber terkait pemberitaan. Ia biasa langsung menolak. Akibat penolakan itu bisa berdampak macam-macam. Apalagi menurutnya narasumber di Medan ini paling tersinggung jika pemberiannya ditolak. Ia biasa mengikuti cara yang kerap dilakukan wartawan Kompas, diambil duitnya, lalu diserahkan pada petugas kebersihan atau satpam. Gery pernah langsung mempraktekkan cara tersebut. Ketika itu bersama seorang temannya dari media lain melakukan wawancara dengan seorang pejabat terkait masalah kartu kuning Disnaker. Usai wawancara dan menerima uang, mereka pun mengembalikan uang itu ke petugas keamanan. Menurut Gery, ini bukan perkara sok jago banyak duit, tapi Rp 50 ribu pun yang ia terima, akan langsung tersebar ke seantero Medan jika mereka, dua wartawan itu, telah diamankan dengan uang. Itulah, kata Gery, tidak enaknyanya menerima uang kalau karena pemberitaan.

Namun jika melalui perantara ia mau menerima. Kebanyakan narasumber itu menurutnya sudah memilih wartawan tertentu untuk mendistribusikannya. Jika ia salah satu yang mendapat bagian, ia akan ambil uang itu. Meskipun sesekali ia pernah menolak, biasanya jika yang memberikan anggota DPRD Komisi D. Mereka, kata Gery, sengaja mengkritisi melalui media semua bangunan-bangunan bermasalah supaya kontraktornya datang. Ia merasa bodoh jika menerima, anggota dewan itu memberi Gery Rp 200 ribu, sementara mereka ingin dapat Rp 2 juta dari kontraktor itu. Enak kali, pikir Gery. Ia lebih senang jika menerima amplop dari kegiatan seremoni seperti ‘Indomie Gelar Donor Darah’ atau ‘PMI Sunatan Massal’, tak ada beban baginya.

“Banyak yang lebih ganas sebenarnya kalau cerita ini selain aku. Kau bayangkanlah, gajinya Rp 800 ribu, Innova-nya dua. Dari situ aja kita *gak* bisa membayangkan berapa pendapatannya mengurus mobilnya itu. Kalau Innova dua, rumahnya juga tak mungkin tipe 36,” tuturnya.

Sikapnya yang menolak pemberian secara langsung oleh narasumber itu ternyata berdampak tidak baik pada hubungannya dengan teman-teman wartawan lain. Ia dianggap sok suci. Karena itu ia berusaha menjaga perasaan teman-temannya dengan tidak melakukan liputan bersama yang lain. Sebab menurutnya, saat pagi hari biasanya sudah disusun rencana, hari itu mau diarahkan ke mana untuk mencari uang tambahan.

AJI Medan sendiri menurut Gery tak pernah membicarakan hal-hal yang seperti ini. Ia menyebut, semuanya sok menutupi diri dan sok suci. Orang-orang di AJI menurutnya memang tidak mengambil uang dari APBD, tapi AJI kerap menerima proyek-proyek dari luar negeri. Kan sama saja, katanya. Gery meneruskan, ada pula

namanya program *saving*. Bantuan dari Jakarta misalnya Rp 50 juta, tetapi tidak dihabiskan, disisakan supaya ada *saving* ke kas. Sementara yang dilaporkan seluruhnya habis. Dengan nada bertanya Gery menyatakan kepada peneliti, apa itu tidak korupsi.

Sementara sikap anti amplop selama ini menurut Gery, tegas diterapkan AJI. Sudah ada yang pernah dipecat. Ketika itu dia yang membagi-bagi duit dan secara kebetulan ada anak AJI juga yang dibaginya. Orang itu kemudian mengadukan hal ini, maka terjadilah pemecatan.

Secara pribadi Gery mengaku juga anti amplop. Meskipun ia merasa tidak enak berbicara anti amplop di depan teman-temannya wartawan lain yang gajinya Rp 600 ribu/bulan. Situasi ini menurutnya sudah berat, tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Ia berharap tak hanya para pejabat dan aparat saja yang masuk penjara, tapi wartawan juga. Terlalu kejam jika wartawan dibunuh, cukup masuk penjara aja. Wartawan menurutnya banyak yang membohongi publik, membuat berita hanya untuk kepentingannya. Itulah sebabnya Gery ingin segera keluar dari profesi ini. Ia ingin menjadi pengusaha. Membuka warung internet.

Gery tak punya obsesi apa pun lagi saat ini di dunia jurnalistik. Ingin kritis pun tidak bisa. Padahal sejak awal ia ingin serius sebagai jurnalis. Tujuannya ingin menghasilkan tulisan yang berpengaruh, melakukan investigasi. Tapi bekerja apa adanya seperti saat ini membuatnya tersiksa. Pekerjaannya sekarang ia sebut bagai pekerjaan *ecek-ecek*. Tinggal dua hal yang menjadi motivasinya kini. Status wartawan berfungsi sebagai pengaman agar tak ada yang mengganggu dan yang kedua mengharapkan gaji Rp 2 juta setiap bulan. Hanya itu.

Menyikapi permasalahan ini, ia berharap sesama wartawan seluruhnya melakukan introspeksi diri, mau apa menjadi wartawan itu. Wartawan itu menurutnya parlemen jalanan juga, harus ada yang mengontrol. Ia kemudian mengungkapkan rasa pesimisnya terhadap media di Indonesia dengan mengungkapkan beberapa contoh yang berkembang saat ini. Mengutip pernyataan Farid Gaban, seorang jurnalis senior Indonesia, Gery mengatakan terlalu enak menjadi wartawan Indonesia, wartawan di Rusia itu harus membaca naskah-naskah asli Leo Tolstoy terlebih dahulu. Ia menambahkan, terlalu jauh bedanya dengan wartawan di Indonesia. Jarang wartawan di sini yang sudah membaca buku-buku Sutan Takdir Alisjahbana, Marah Rusli, Pramoedya Ananta Toer. Menurutnya, masih minim kosa kata tapi tiba-tiba udah punya kartu pers. Sudah terbentuk pemikiran, wartawan itu enak mendapatkan sesuatu dan rentan disalahgunakan.

IV.1.2 Hasil Pengamatan

Setelah melakukan wawancara mendalam terhadap keempat responden tersebut, ternyata terdapat kesamaan informasi yang diberikan sehingga peneliti menyudahi proses penelitian. Hal ini sesuai teknik penarikan sampel snowball, yang digunakan dalam penelitian ini.

Peneliti juga melakukan observasi perilaku mereka dalam melaksanakan tugas jurnalistik di lapangan. Pengamatan tidak seluruhnya dilakukan secara langsung karena keterbatasan akses yang dimiliki peneliti.

Responden I, Reza, yang selama proses wawancara menyatakan tidak menerima amplop lagi sejak masuk AJI, ternyata tidak sesuai dengan perilakunya di lapangan. Peneliti mengikuti kegiatannya dalam sebuah acara yang digelar salah satu BUMN. Acara tersebut memang diperuntukkan bagi wartawan yang berangkat atas nama medianya. BUMN tersebut mengemasnya dalam bentuk kunjungan wisata ke salah satu obyek wisata di Sumatera Utara pada 18-20 Juli 2011. Selain mendapat fasilitas mewah dan berbagai cendera mata, di akhir acara setiap wartawan juga menerima amplop atau disebut 'uang saku'. Tak ada satu pun wartawan yang menolak, termasuk Reza. Peneliti yang kebetulan terlibat dalam kegiatan itu, mendapatkan data pembagian 'uang saku' itu dari salah satu staf humas BUMN tersebut. Sayangnya, ia enggan membeberkan jumlah nominal yang diterima setiap wartawan.

Selain pengamatan langsung, peneliti juga mendapat informasi tambahan terkait responden 1, dari responden 2, Doni. Ia menceritakan, ketika itu tahun 2009. Ada anggota DPR yang sedang berkunjung saat pemilihan presiden. Usai kegiatan setiap wartawan diberi amplop. Doni mengaku langsung pulang dan tidak menerima, tetapi keesokan hari ia mendapat informasi dari wartawan lain jika seluruh wartawan yang ada menerima, termasuk Reza. Besarnya Rp 500 ribu. Selain itu ia juga sering mendengar Reza menerima amplop pada kegiatan-kegiatan yang digelar partai penguasa tersebut, meskipun Doni belum pernah melihat langsung.

Observasi mendalam hanya dapat dilakukan pada Reza, disebabkan akses yang sulit untuk dilakukan pada tiga orang lainnya. Ada yang sudah jarang turun ke lapangan,

ada yang wilayah liputannya berada di daerah, sementara responden 3, Budi, secara terbuka sudah menyatakan tetap menerima dengan alasan kebutuhan.

IV.2 Pembahasan

AJI menafsirkan independensi sebagai tempat berlindung seorang wartawan dari berbagai kepentingan yang menyinggung profesinya. Koordinator Divisi Pekerja AJI Indonesia, Winuranto Adhi, menyatakan independensi sebagai syarat mutlak bagi seluruh anggota AJI. Menurutnya, AJI sengaja menekankan pentingnya makna independen tersebut agar para anggotanya tidak rentan terhadap suap.

Hasil wawancara terhadap empat informan tersebut, menunjukkan jika seluruhnya melanggar kode etik AJI yang dianggap dapat memengaruhi independensi yakni pada poin 14 yang berbunyi, “jurnalis tidak dibenarkan menerima sogokan.” Ketua Komite Etik AJI Medan, Bambang Soed, menjelaskan penafsiran dari poin tersebut yang berarti semua anggota AJI tidak boleh menerima pemberian apa pun dari narasumber termasuk souvenir seperti kaos. Pemberian yang mengatasnamakan pribadi juga disebutnya termasuk pelanggaran. Sebab orang tersebut tentu mengenalnya karena ia wartawan sehingga pemberian tersebut tetap atas dasar seorang sumber berita dan wartawan. Sama halnya dengan pemberian yang bersifat ‘hadiah’ saat wartawan itu mengundang narasumbernya untuk sebuah hajatan atau acara syukuran. Bambang menyebut pemberian tersebut dapat dikategorikan gratifikasi dan jelas melanggar. Pihaknya menyarankan agar wartawan khususnya anggota AJI Medan untuk tidak terlalu sering bergaul dengan sumber berita.

Mejelis etik sendiri dalam sistem organisasi AJI berfungsi untuk mengawasi perilaku anggota AJI, agar tetap melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan kode etik jurnalistik. Majelis ini biasa bekerja setelah menerima pengaduan dari masyarakat maupun anggota AJI. Namun yang mengejutkan, ternyata sejak 2009 hingga saat ini belum ada satu kasus pelanggaran pun yang dibahas dalam sidang Majelis Etik AJI Medan. Bambang Soed menyebut situasi ini hanya sebuah kebetulan, hal ini menurutnya karena saat ini anggota AJI masih konsisten dengan idealismenya sehingga menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik. Pernyataannya tentu bertolak belakang dengan hasil penelitian ini.

IV.2.1 Proses Atribusi

Bila kita melihat perilaku orang lain, kita mencoba memahami apa yang menyebabkan ia berperilaku seperti itu. Fritz Heider (dalam Rakhmat, 2005:93) mengemukakan, bila kita mengamati perilaku sosial, pertama-tama kita menentukan dahulu apa yang menyebabkannya: faktor situasional atau personal; dalam teori atribusi lazim disebut kausalitas eksternal dan kausalitas internal.

Hasil penelitian ini menunjukkan faktor situasional lebih dominan dalam memengaruhi perilaku mereka. Sesuai dengan teori yang berlaku di atas, maka situasi ini disebut kausalitas eksternal.

Faktor situasional tersebut disebabkan pengaruh lingkungan yang menjadi keseharian para wartawan. Berbagai faktor menjadi penyebab, seperti gaji rendah maupun kompensasi minim yang diterima. Pendapatan tersebut tak mampu menutupi

besarnya pengeluaran sehingga secara langsung maupun tidak muncul tuntutan dari keluarga untuk menutupinya. Selain itu narasumber juga termasuk faktor lain yang memengaruhi. Sumber berita terbiasa memberikan ‘pelayanan’ bagi wartawan, baik dalam bentuk hiburan, hadiah maupun fasilitas-fasilitas lainnya. Terkadang narasumber juga sangat berharap hingga setengah memaksa agar wartawan mau menerima pemberian darinya, maka terkadang muncullah perasaan tak enak si wartawan atau sekadar menjaga hubungan baik dengan menerima pemberian itu. Beberapa contoh tersebut jelas menunjukkan jika faktor situasional atau keadaan yang menyebabkan mereka melakukan perbuatan yang melanggar kode etik jurnalistik sehingga rentan menggoyangkan independensi seorang wartawan.

Kita mengatribusikan perilaku orang lain disebabkan internalnya saat konsensus dan *distinctiveness* rendah tapi konsistensi tinggi. Sedangkan jika perilaku seseorang dipengaruhi penyebab eksternal itu karena ketiganya tinggi. Yang terakhir, perilaku seseorang dikatakan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal ketika konsensus rendah tetapi konsistensi dan *distinctiveness* tinggi (Byrne dkk, 2006: 95).

Proses atribusi eksternal yang tinggi terjadi pada mereka, disebabkan konsensus, konsistensi dan *distinctiveness* yang ada pada diri mereka juga tinggi. Keempat responden memiliki pengaruh eksternal yang berbeda namun secara umum memiliki tiga unsur tersebut.

Menurut Kelly (dalam Byrne dkk, 2006:95) ada tiga cara untuk menjawab pertanyaan mengapa seseorang berperilaku seperti itu, yakni:

- a. Konsensus, yaitu memperluas kita melihat apakah orang lain bereaksi dengan stimulus yang ada atau bahkan berperilaku yang sama dengan orang yang kita amati. Semakin tinggi proporsi orang yang bereaksi secara sama, berarti semakin tinggi konsensusnya. Lingkungan sekitar yakni teman-teman wartawan sendiri memiliki peran besar terhadap pembentukan perilaku seorang wartawan. Perilakunya dipengaruhi jumlah kebiasaan mayoritas yang terjadi. Responden 1, Reza, menyebutkan saat ia menerima amplop salah satu faktornya disebabkan ikut-ikutan dengan teman. Reza mengaku menerima uang itu karena tak ingin temannya tersinggung sehingga jika dalam kondisi beramai-ramai atau bersama rekan yang lain, ia akan menerima pemberian narasumber itu. Hal yang sama juga kerap berlaku pada responden 4, Gery. Salah satu alasannya menerima amplop karena ia tak ingin bagian yang sudah menjadi 'hak'-nya diambil orang lain. Secara tidak langsung ia juga memilih untuk mengikuti kebiasaan yang sudah terjadi dan melakukan hal yang sama dengan mereka. Sementara responden lain meskipun tak menyebutkan ini sebagai alasan utama, namun tetap memiliki peran dalam membentuk perilaku mereka.
- b. Konsistensi, yaitu bagaimana seseorang bereaksi bila dibandingkan dengan orang-orang lain, terhadap stimulus tertentu. Dalam artian sejauh mana orang-orang lain merespon stimulus yang sama dengan cara yang sama dengan orang yang kita atribusi. Misalnya bila A berperilaku tertentu, sedangkan orang-orang lain tidak berbuat demikian, maka dapat dikatakan bahwa konsensus orang yang bersangkutan rendah. Konsistensi terbentuk karena perbuatan yang terus menerus dilakukan hingga membentuk kebiasaan. Responden 3, Budi, masih terus

menerima amplop demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Kompensasi yang diberikan media tempat ia bekerja tidak cukup, maka ia pun terbiasa menjadikan amplop sebagai salah satu pemasukan bagi keluarganya. Perilakunya yang secara berkelanjutan menerima amplop akhirnya membentuk sebuah kebiasaan yang berlaku secara rutin sebagai salah satu sumber pendapatan. Begitu juga yang dilakukan responden 2, Doni. Kemudahan yang ia dapat dalam hal pengurusan administrasi pemerintahan menyebabkan ia terus 'ketagihan' melakukan perbuatan itu. Padahal Doni sadar jika perilakunya tidak dibenarkan dan kerap mengganggu independensinya saat orang yang selama ini sering membantunya kemudian menjadi sumber berita baginya. Namun ia terus memanfaatkan statusnya sebagai wartawan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan itu karena sudah biasa dilakukan dan menjadi kebiasaan.

- c. *Distinctiveness* atau kekhususan yaitu bagaimana seseorang merespon dengan cara yang sama atas stimulus atau situasi yang berbeda. Jadi, meskipun dalam bentuk yang berbeda ia tetap menerima pemberian dari narasumber. Responden 1, Reza, mengaku tak mau menerima amplop yang diberikan kepadanya atas nama wartawan, tapi ia tak akan menolak jika pemberian tersebut mengatasnamakan pribadi. Aji sendiri menganggap pemberian dalam bentuk apa pun dari sumber berita dikategorikan sogokan dan tidak boleh diterima. Begitu juga yang dilakukan ketiga responden lainnya, Doni, Budi dan Gery. Mereka mengaku berusaha meminimalkan menerima pemberian dalam bentuk uang, namun mereka kerap menikmati fasilitas yang diberikan sumber berita seperti fasilitas hiburan maupun kemudahan akses pengurusan tertentu.

IV.3 Penelitian Sejenis

Peneliti juga mencantumkan penelitian lain yang terkait dengan kewartawanan sebagai penunjang hasil penelitian ini. Berikut dua penelitian yang merefleksikan profesi kewartawanan.

IV.3.1 Kekerasan terhadap Wartawan

Penelitian ini dilakukan oleh Andayani (990904006), mahasiswa Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sumatera Utara pada tahun 2003. Penelitian ini berjudul **“Studi deskriptif tentang kekerasan terhadap wartawan pada anggota Persatuan Wartawan Indonesia cabang Medan”**.

Kekerasan terhadap wartawan terus terjadi dan terus meningkat. Ancaman terhadap pers tidak mau berhenti, walaupun dalam UU Pers No 40 tahun 1999 tentang pers jelas menyebutkan, “hukuman penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal Rp 500 juta bagi siapa saja yang menghalangi kemerdekaan pers”.

Pembunuhan, penembakan, penculikan, penganiayaan, pengusiran, pelecehan, ancaman, pemukulan, teror, penghinaan, perusakan kantor media massa dan penyitaan properti merupakan kekerasan terhadap wartawan dalam tindakan menghalangi kemerdekaan pers.

Penegak hukum, polisi, tentara, merupakan pelaku kekerasan yang paling besar terhadap wartawan di lapangan. Selain aparat, masih banyak pelaku kekerasan terhadap wartawan di antaranya organisasi kepemudaan, masyarakat, pegawai pemerintahan,

pengusaha, instansi swasta bahkan anggota DPRD. Kekerasan terhadap jurnalis disebabkan adanya pihak yang tidak puas dengan pemberitaan yang dilakukan wartawan. Ketika wartawan dibunuh, dianiaya atau diancam, tujuannya biasanya untuk mencegah terungkapnya informasi yang layak diketahui publik.

IV.3.2 Profesionalisme Jurnalis Televisi Lokal

Penelitian ini dilakukan oleh Riduan (04220311), mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2009. Penelitian ini berjudul **“Studi pada Jurnalis Agropolitan Televisi Batu”**.

Hasil penelitian ini menunjukkan para jurnalis Agropolitan TV Batu, belum memenuhi standar profesional. Sikap tidak profesional itu disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, latar belakang pendidikan para jurnalis yang tidak sesuai dengan profesinya. Selain itu, persoalan kompensasi juga menjadi penyebab. Perusahaan media belum memberikan gaji dan penghargaan yang layak bagi para wartawan.

Penyebab lain, jurnalis Agropolitan TV belum bisa dikatakan ahli dalam pekerjaan, hal ini terbukti dengan seringnya ditemukan berita yang kurang menarik. Yang terakhir, para wartawan kerap melanggar kode etik jurnalistik, sehingga belum mampu memenuhi standar profesional.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kompensasi wartawan dan independensi dalam membuat pemberitaan terhadap wartawan anggota Aliansi Jurnalis Independen cabang Medan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kompensasi yang diterima wartawan anggota AJI cabang Medan ternyata memprihatinkan. Padahal keempat orang responden tersebut bekerja di media dengan oplah yang cukup besar di Sumatera Utara maupun jaringan media nasional. Kompensasi yang mereka terima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Padahal jurnalis bukan pekerjaan biasa. Ia memiliki tugas berat dengan tanggung jawab besar dan resiko tinggi, membutuhkan waktu dan tenaga untuk melakukan riset, liputan dan verifikasi. Mereka bekerja secara intelektual, tak hanya teknis semata demi memburu target berita.
- b. Menerima pemberian narasumber dapat mengganggu independensi wartawan anggota AJI cabang Medan dalam mengkonstruksi pemberitaan.
- c. Kebijakan yang diterapkan AJI Indonesia ternyata tak mampu dijalankan hingga ke daerah, khususnya cabang Medan. Kondisi kesejahteraan yang

rendah menjadi penyebab kampanye tolak amplop masih jadi perdebatan di lingkungan AJI Medan.

- d. Rendahnya kompensasi menyebabkan mereka harus melakukan berbagai cara untuk mencari pendapatan lain demi memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya dengan menjalani berbagai pekerjaan sampingan. Berbagai aktivitas lain tersebut ada yang rentan menimbulkan konflik kepentingan dan tentu mengganggu konsentrasi mereka sebagai seorang jurnalis.
- e. Profesi jurnalis tak lagi dijalankan secara profesional berdasarkan kode etik dan fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi. Profesi wartawan hanya menjadi hobi, bersifat sementara. Seolah hanya menjadi rutinitas. Padahal ia merupakan pendidik informal, sang penyampai kebenaran dan pemantau kekuasaan.
- f. Jurnalis juga menjadi mudah menerima amplop (dalam bentuk uang atau pun barang dan fasilitas). Mereka tidak menganggap pemberian narasumber atau subjek berita itu sebagai embrio penyusunan atau penyogokan untuk jangka panjang. Seolah-olah tidak ada kaitan antara kebiasaan menerima amplop dan kemungkinan kemandekkan dalam pengembangan standar jurnalistik profesional.
- g. AJI yang selama ini dikenal begitu ketat dan tegas menindak anggotanya yang melanggar kode etik ternyata tak bisa berbuat banyak menghadapi persoalan amplop bagi wartawan di Medan. Meski diancam dengan sanksi pemecatan, banyak anggota AJI yang nekat menerima amplop demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

- h. Proses atribusi yang berlangsung disebabkan faktor situasional atau atribusi kausalitas eksternal. Hal ini disebabkan konsensus, konsistensi dan *distinctiveness* yang berlaku pada mereka tergolong tinggi.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti perlu mengajukan beberapa saran, di antaranya:

- a. Perlunya perhatian sangat serius dari pemerintah untuk membuat regulasi dalam rangka memberikan kehidupan yang layak bagi wartawan. Mereka bahkan dihargai lebih rendah dari buruh kasar dengan masih banyaknya yang mendapat kompensasi di bawah UMR. Demokrasi tak akan sehat jika pers tak menjalankan fungsinya.
- b. Perlunya peran yang lebih besar bagi Dewan Pers agar dapat menjadi hakim dalam lingkup pers Indonesia. Selama ini lembaga tersebut hanya bekerja berdasarkan pengaduan, sehingga perlu diperluas wewenang dan fungsinya agar dapat melakukan kontrol secara ketat. Perlu pengawasan dan sanksi yang tegas agar wartawan senantiasa bekerja berdasarkan kode etik.
- c. Kebebasan pers jangan sampai kebablasan. Pemerintah melalui Dewan Pers harus melakukan seleksi ketat terhadap izin pendirian media, tentu dengan regulasi yang jelas dan transparan. Pemerintah harus membuat standar khusus kompensasi wartawan. Media yang bisa mendapat izin, hanya yang mampu memenuhi itu. Sehingga media dapat berjalan sesuai

fungsinya. Tidak seperti saat ini yang terlalu gampang mendirikan media. Dengan modal seadanya, media dapat dimanfaatkan sebagai alat berbagai kepentingan.

- d. Wartawan diharapkan dapat menahan diri untuk tidak menerima amplop. Memang, tidak semua amplop (dalam bentuk uang maupun barang dan fasilitas) dapat dikategorikan sebagai suap atau sogok. Akan tetapi amplop bernilai kecil pun, bila dianggap sebagai kewajiban dalam pekerjaan pers, tetap akan mengganggu integritas wartawan.
- e. Perusahaan pers bersikap terbuka terhadap wartawan tentang kondisi keuangan dan perkembangan perusahaan sehingga bisa terbangun diskusi dengan para wartawannya terkait kondisi kesejahteraan mereka.
- f. AJI selama ini dihormati karena anggotanya yang dinilai “bersih”. Sebab itu harus terus menjaga integritasnya. Komite etik yang menyatakan tak ada anggota AJI Medan yang menerima amplop dalam tiga tahun terakhir ternyata terbantahkan dengan adanya penelitian ini. Hasil ini dapat menjadi acuan untuk semakin memperketat pengawasan. AJI Indonesia juga perlu melakukan penyesuaian program dengan kondisi di masing-masing AJI cabang.
- g. Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi teman-teman mahasiswa lainnya yang ingin meneliti persoalan wartawan. Penelitian ini juga diharapkan menjadi pelepas dahaga di tengah minimnya penelitian tentang wartawan di Departemen Ilmu Komunikasi FISIP USU.

- h. Kelemahan penelitian ini adalah kurangnya observasi langsung termasuk meneliti berita yang dihasilkan responden untuk melihat independensinya. Diharapkan bagi peneliti yang tertarik dengan masalah serupa agar bisa menyempurnakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmakusumah dkk. 2003. *Menggugat Praktek Amplop Wartawan Indonesia*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.
- Arep, Ishak dan Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Asmaradhana, Upi. 2008. *Pengkhianatan Jurnalis*. Jakarta: ISAI.
- Assegaf, Dja'far. 1991. *Jurnalistik Masa Kini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bogdan, Robert dan Steven J.Taylor. 1992. *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Broder, David S. 1992. *Berita di Balik Berita*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Byrne, dkk. 2006. *Social Psychology*. Boston: Pearson Education.
- Cangara, Hafied. 2007. *Pengantar Ilmu Komunikasi (edisi revisi)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi IV)*. Jakarta: Gramedia
- Eriyanto. 2006. *Potret Jurnalis Indonesia*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.
- Harsono, Andreas. 2010. *'Agama' Saya Adalah Jurnalisme*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Junaedhi, Kurniawan. 1991. *Ensiklopedia Pers Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kovach, Bill dan Tom Rosenstiel. 2001. *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Jakarta: Yayasan Pantau.
- Kriyantono. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Liliweri, Alo. 1991. *Komunikasi Antar Pribadi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan, Malayu. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mangkunegara, A A Anwar Prabu. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2002. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nurudin. 2009. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Oetama, Jakob. 1987. *Perspektif Pers Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
2001. *Pers Indonesia: berkomunikasi dalam masyarakat tidak tulus*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Panuju, Redi. 2005. *Nalar Jurnalistik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Purba, Amir dkk . *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Medan: PUSTAKA BANGSA PRESS.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendy. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Sukardi, Wina Armada. 2009. *Menakar Kesejahteraan Wartawan*. Jakarta: DEWAN PERS.
- Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: ANDI.

Sumber lain:

Internet

<http://ajiindonesia.org/> diakses pada 24 Februari 2010 pukul 14.10 WIB.

<http://dewanpers.org/> diakses pada 25 Februari 2010 pukul 20.30 WIB.

Skripsi

Andayani. 2003. *Studi deskriptif tentang kekerasan terhadap wartawan pada anggota Persatuan Wartawan Indonesia cabang Medan*. Medan: FISIP-USU.

Riduan. 2009. *Studi pada Jurnalis Agropolitan Televisi Batu*. Malang: FISIP-UMM.

Sa'adah, Nur. 1994. *Studi Komparatif antara Kebijakan Pemberitaan Liputan Investigasi Pada Majalah Berita Mingguan TEMPO dengan Harian WASPADA*. Medan: FISIP-USU.

Biodata Penulis

Data Pribadi

Nama : Khairil Hanan Lubis
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat, tanggal lahir : Medan, 31 Agustus 1989
Agama : Islam
Alamat lengkap : Jl. Sei Batang Gadis No. 2A Medan.
Telepon : 085296709155
E-mail : k_hnan@yahoo.co.id

Pendidikan Formal

2007 – 2011 : S1 Departemen Ilmu Komunikasi FISIP USU
2004 – 2007 : SMA Harapan I, Medan
2001 – 2004 : SMP Ar-Rahman, Medan
1995 – 2001 : SD Harapan I, Medan

Pendidikan Non Formal

- “Kursus Mahir Dasar Jurnalistik” diselenggarakan Pusat Pengkajian Media Masaa, 9 Agustus 2008 di Medan.
- “Pelatihan Jurnalistik Tingkat Dasar se-Kota Medan” diselenggarakan Pers Mahasiswa Kreatif, 20 September 2008 di Medan.
- “Workshop Foto Jurnalistik” diselenggarakan Lembaga Pendidikan Jurnalistik LKBN ANTARA, 14 November 2009 di Medan.
- “Pelatihan Jurnalistik Mahasiswa Tingkat Lanjut” diselenggarakan LPM Teknokra Universitas Lampung, 4-9 Oktober 2010, di Bandar Lampung.
- “Kursus Menulis Narasi” diselenggarakan Eka Tjipta Foundation bersama Andreas Harsono, 25-30 Oktober 2010, di Padang Halaban, Sumatera Utara.
- “Coaching Clinic Local Portal” diselenggarakan Detikcom, 11-13 Juli 2011 di Jakarta.

Pengalaman

2008-2009 : Divisi Humas, Ikatan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP USU.
2009 (Juni) : Magang sebagai reporter di Harian Global Medan.
2010 (Juni-Juli) : Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
2010 : Pemimpin Redaksi Pers Mahasiswa SUARA USU.
2011- kini : Pendiri portal lokal Ribak Sude, bekerjasama dengan Detikcom.
2011- kini : Chief Editor Smart Magz.

